

**LAPORAN KINERJA
DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN MAGETAN
TAHUN 2024**



**DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN MAGETAN
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya penyusunan Laporan Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan Tahun 2024 dapat terselesaikan.

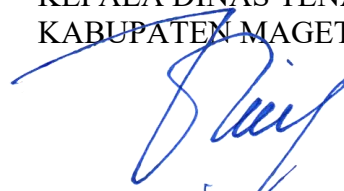
Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan terhadap keberhasilan dan/atau kegagalan organisasi untuk mencapai Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan serta kontribusi dalam mewujudkan Visi dan Misi Bupati Magetan. Di samping itu, laporan ini memuat informasi secara transparan tentang pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan pencapaian sasaran dalam rangka mewujudkan tujuan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan yaitu Meningkatkan Penyerapan dan Partisipasi Angkatan Kerja.

Tujuan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan terpercaya. Laporan kinerja juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi yang obyektif bagi pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) dalam menilai capaian kinerja dan pertanggungjawaban Instansi Pemerintah guna meningkatkan kinerja sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan lebih lanjut.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2024 ini masih banyak kekurangan atau masih jauh dari sempurna, untuk itu saran dan masukan yang bersifat membangun demi sempurnanya penyusunan Laporan Kinerja ini sangat kami harapkan yang nantinya akan kami pergunakan sebagai bahan penyempurnaan dalam penyusunan Laporan Kinerja di tahun mendatang.

Magetan, Januari 2025

KEPALA DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN MAGETAN



Drs. ARIEF RIDWAN, MM
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 196605161986031005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
BAB I PENDAHULUAN	5
A. LATAR BELAKANG	5
B. KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI	6
C. TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI	8
D. SUMBER DAYA ORGANISASI	8
1. Kepegawaian	8
2. Sarana dan Prasarana	11
3. Anggaran	12
E. ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN UTAMA PERANGKAT DAERAH	15
F. LANDASAN HUKUM	17
G. SISTEMATIKA PENYAJIAN	17
BAB II PERENCANAAN KINERJA	19
A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2024-2026	19
1. Tujuan dan Sasaran RPD Tahun 2024-2026	20
2. Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Tahun 2024-2026	20
3. Strategi dan Arah Kebijakan Tahun 2024-2026	22
4. Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024-2026	23
B. RENCANA KERJA TAHUN 2024	26
C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024	27
BAB III AKUNTABILIS KINERJA	38
A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024	40
1. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024	40
2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;	42
3. Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;	45
4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;	46
5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	50
B. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2024	55
C. EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA TAHUN 2024	57
BAB IV PENUTUP	62
A. SIMPULAN	62
B. RENCANA AKSI TAHUN 2025	64
LAMPIRAN:	66
A. Matriks Renstra Terakhir	66
B. Indikator Kinerja Utama dan Perubahannya	79

C.	Matriks Renja Tahun 2024	84
D.	Perjanjian Kinerja dan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024	98
E.	Pengukuran Kinerja	102
F.	Pohon Kinerja	103
G.	<i>Crosscutting</i>	104
H.	<i>Cascading</i>	105

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Laporan Kinerja tahun 2024 adalah capaian kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah yang sudah ditetapkan di dalam Perjanjian Kinerja (PK) perangkat daerah tahun 2024 secara berjenjang yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya, tanpa mengesampingkan indikator lain yang relevan. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Tenaga Kerja selaku unsur pembantu Bupati, khususnya dalam bidang Tenaga Kerja, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas Tenaga Kerja sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan Tahun 2024 bertujuan untuk:

1. Sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan;
2. Sumber informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Dinas Tenaga Kerja dengan pembandingan hasil pengukuran kinerja dan penetapan kinerja;
3. Bahan evaluasi untuk penyusunan rencana kegiatan dan kinerja Dinas Tenaga Kerja pada tahun berikutnya.

B. KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Bupati Magetan Nomor 89 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan pada pasal 2 (dua), Dinas Tenaga Kerja merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja yang menjadi kewenangan Daerah. Dinas Tenaga Kerja dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja terdiri atas:

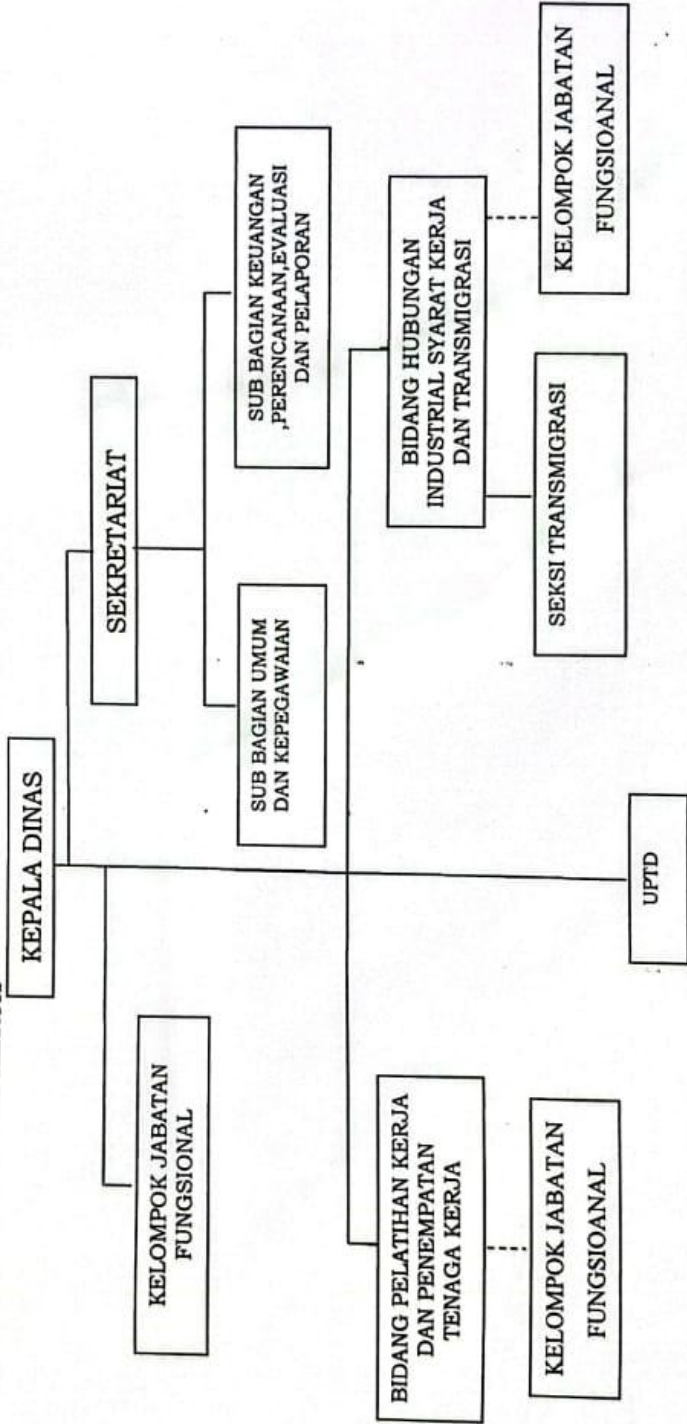
1. Sekretariat
2. Bidang Pelatihan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja
3. Bidang Hubungan Industrial Syarat Kerja dan Transmigrasi

Berikut bagan susunan organisasi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan.

Gambar 1.1.
Susunan Organisasi
Dinas Tenaga Kerja
Kabupaten Magetan

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS TENAGA KERJA

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR : 89 TAHUN 2021
TANGGAL : 31 Desember 2021



BUPATI MAGETAN

SUPRAWOTO

C. TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Bupati Magetan Nomor 89 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan pada pasal 4 (empat), Dinas Tenaga Kerja mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan, bidang transmigrasi dan tugas pembantuan.

Dalam menyelenggarakan tugasnya tersebut Dinas Tenaga Kerja menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

D. SUMBER DAYA ORGANISASI

1. Kepegawaian

Berjalannya organisasi sangat ditentukan oleh kuantitas maupun kualitas sumber daya manusia aparatur. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, Dinas Tenaga Kerja didukung oleh pegawai sebanyak 22 (dua puluh dua) orang, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Rencana Kebutuhan dan Realisasi Pegawai

Tabel 1.1.
Rencana Kebutuhan dan Realisasi Pegawai
Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan
Per 31 Desember 2024

No.	Jabatan	Kebutuhan (orang)	Realisasi (orang)	Kekurangan/ Kelebihan (orang)
1	Kepala Dinas	1	1	0
2	Sekretaris	1	0	-1
3	Kabid Pelatihan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja	1	1	0
4	Kabid Hubungan	1	1	0

No.	Jabatan	Kebutuhan (orang)	Realisasi (orang)	Kekurangan/ Kelebihan (orang)
	Industrial, Syarat Kerja dan Transmigrasi			
5	Kasubbag Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	1	1	0
6	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	1	1	0
7	Kasi Transmigrasi	1	1	0
8	Penelaah Teknis Kebijakan	7	4	-3
9	Fasilitator Pemerintahan	3	0	-3
10	Penata Layanan Operasional	1	0	-1
11	Pengelola Data dan Informasi	2	2	0
12	Pengadministrasi Perkantoran	3	1	-2
13	Pengolah data dan Informasi	5	2	-3
14	Operator Layanan Operasional	5	0	-5
15	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	1	0	-1
16	JF Penggerak Swadaya Masyarakat	1	1	0
17	JF Analis Hukum Ahli Pertama	1	1	0
18	JF Pengantar Kerja Ahli Pertama	3	0	-3
19	JF Pengantar Kerja Ahli Muda	1	1	0
20	JF Pengantar Kerja Ahli Madya	1	0	-1
21	JF Instruktur Pertama	2	2	0
22	JF Instruktur Muda	2	1	-1
23	JF Instruktur Madya	1	0	-1
24	JF Mediator	2	0	-2

No.	Jabatan	Kebutuhan (orang)	Realisasi (orang)	Kekurangan/ Kelebihan (orang)
	Hubungan Industrial Pertama			
25	JF Mediator Hubungan Industrial Muda	1	1	0
26	JF Mediator Hubungan Industrial Madya	1	0	-1
27	JF Arsiparis Terampil	1	0	-1
28	JF Perencana Ahli Pertama	1	0	-1
	Jumlah	52	22	-30

Sumber : Kepegawaian Disnaker Magetan

Sesuai dengan tabel 1.1 diatas dapat dijelaskan bahwa kebutuhan pegawai pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan sesuai dengan rencana kebutuhan pegawai adalah sebanyak 52 orang, namun hingga per 31 Desember 2024 kebutuhan pegawai tersebut baru terpenuhi sebanyak 22 orang sehingga masih terdapat kekurangan pegawai sebanyak 30 orang.

b. Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang

Tabel 1.2.
Pangkat/Golongan Ruang Pegawai
Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan
Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang
Per 31 Desember 2024

No.	Pangkat/Golongan Ruang	Jumlah (orang)
1	Pembina Utama/IV-d	
2	Pembina Utama Muda/IV-c	1
3	Pembina Tk.I/IV-b	
4	Pembina/IV-a	1
5	Penata Tk.I/III-d	6
6	Penata/III-c	2
7	Penata Muda Tk.I/III-b	6
8	Penata Muda/III-a	4
9	Pengatur TK.I/II-d	1
10	Pengatur/II-c	1
	Jumlah	22

c. Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 1.3.
Tingkat Pendidikan Pegawai
Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan
Per 31 Desember 2024

No.	Pendidikan	Jumlah (orang)
1	Strata 3	
2	Strata 2	1
3	Strata 1/Sederajat	15
4	Diploma	5
5	SMA/Sederajat	
6	SMP/Sederajat	1
7	SD/Sederajat	
	Jumlah	22

c. Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah (orang)
1	Laki-laki	14
2	Perempuan	8
	Jumlah	22

2. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana berupa aset tetap yang ada di Dinas Tenaga Kerja per 31 Desember 2024 dapat dirinci dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1.4
Aset Tetap Dinas Tenaga Kerja
per 31 Desember 2024
(Sebelum Penyusutan)

No.	Aset Tetap	Per 31 Desember Tahun 2023 (Rp) (Barang Keseluruhan)	Mutasi Tahun 2024		Per 31 Desember Tahun 2024 (Rp) (Barang Keseluruhan)
			Bertambah	Berkurang	
	Tanah	67.000.000	-	-	67.000.000
	Peralatan dan Mesin	1.757.102.680	52.682.500	-	1.809.785.180
	Gedung dan Bangunan	1.387.688.823	-	-	1.387.688.823
	Jalan, Irigasi dan Jaringan	110.000.000	-	-	110.000.000
	Aset Tetap Lainnya	4.750.000	-	-	4.750.000
	Konstruksi dalam Pengerjaan				
	Jumlah	3.326.541.503	52.682.500	-	3.379.224.003

3. Anggaran

Dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan, telah disusun program dan kegiatan dengan anggaran yang telah ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Magetan Tahun 2024. Alokasi anggaran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 5.458.578.590,- dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.5
Anggaran Belanja Dinas Tenaga Kerja
Tahun Anggaran 2024

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja		Pagu Anggaran Tahun 2024
		Satuan	Volume	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kepuasan ASN Dinas Tenaga Kerja terhadap layanan kesekretariatan Dinas Tenaga Kerja	Indeks	80	3.457.628.590
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun Tepat Waktu	Dokumen	21	50.000.000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Serapan Anggaran Perangkat Daerah	Persen	88	2.669.128.590
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang Menerima Pelayanan Kepegawaian sesuai Prosedur	Orang	21	37.800.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Paket	12	220.396.750

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja		Pagu Anggaran Tahun 2024
		Satuan	Volume	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	12	329.603.250
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Dipelihara	Unit	12	150.700.000
Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase Dokumen Rencana Tenaga Kerja	Persen	100	70.000.000
Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Yang Disusun	Dokumen	1	70.000.000
Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Kompeten	Persen	100	1.168.800.000
Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase Pencari Kerja yang Mengikuti Pelatihan Berbasis Kompetensi	Persen	100	1.068.800.000
Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Terakreditasi	Lenbaga	7	70.000.000
Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kerja yang mengikuti Kegiatan Peningkatan dan Pengukuran Produktivitas	Orang	20	30.000.000
Program Penempatan Tenaga Kerja	Presentase Pencari Kerja yang Mendapat Fasilitas Penempatan Tenaga Kerja	Persen	100	432.500.000

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja		Pagu Anggaran Tahun 2024
		Satuan	Volume	
Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Fasilitas Pelayanan Antar Kerja	Orang	2500	135.000.000
Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) yang Mendapatkan Izin, Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Lembaga	5	7.500.000
Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah Penyediaan Lowongan Informasi Pasar Kerja	Lowongan	500	205.000.000
Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Calon Pekerja Migran (CPMI) dan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	Orang	45	85.000.000
Program Hubungan Industrial	Presentase Penyelesaian Perselisihan Kasus Ketengakerjaan	Persen	100	257.150.000
Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perusahaan yang menerapkan tata kelola yang baik	Perusahaan	10	10.000.000

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja		Pagu Anggaran Tahun 2024
		Satuan	Volume	
Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kasus ketenagakerjaan secara bipartit	Perkara	4	247.150.000
Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase penempatan transmigran yang terseleksi dan terlatih	Persen	100	72.500.000
Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah calon transmigran yang terseleksi, mendapat pelatihan dan diberangkatkan	KK	1	72.500.000

E. ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN UTAMA PERANGKAT DAERAH

Isu dan permasalahan sering dianggap sama, walaupun keduanya sebenarnya berbeda. Permasalahan adalah perbedaan (gap) antara kondisi riil dengan kondisi ideal dan/atau perbedaan antara kondisi riil dengan ekspektasinya. Sementara, isu merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah di masa datang (Risiko).

Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi PD adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi PD dimasa datang. Suatu kondisi / kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau

sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Pemahaman atas isu utama pembangunan daerah perlu untuk diperkenalkan sebagai upaya untuk menyamakan langkah gerak penyelesaian masalah pembangunan daerah dengan lebih terpadu dan berorientasi ke depan. Oleh karena itu, pengambil kebijakan perlu melakukan pengambilan keputusan dan atau tindakan atas dasar isu atau permasalahan utama dari pada unit-unit masalah yang berdiri secara parsial.

Isu strategis perangkat daerah yang akan ditangani pada kurun waktu 3 (tiga) tahun sebagaimana tertuang pada Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja periode 2024 – 2026 adalah sebagai berikut :

1. Angka pengangguran semakin meningkat seiring dengan bertambahnya tamatan sekolah/ perguruan tinggi sedangkan kesempatan/ peluang kerja sangat terbatas. Selain itu adanya pandemic Covid-19 juga mengakibatkan naiknya angka pengangguran karena terdapat buruh/ karyawan mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK);
2. Kualifikasi pencari kerja yang tidak sesuai dengan kebutuhan dunia kerja serta masih minimnya ketrampilan kerja didalam penguasaan perkembangan teknologi;
3. Belum optimalnya pelatihan kerja dalam meningkatkan jumlah tenaga kerja yang terlatih/terampil, dan tidak ketersesuaian (link & match) antara dunia Pendidikan dengan kebutuhan penyerapan tenaga kerja industrial;
4. Mulai adanya perselisihan antara pengusaha dengan pekerja seiring dengan banyaknya industri di Magetan ditambah dengan belum pahamnya pelaku industri akan aturan ketenagakerjaan.
5. Minimnya pengetahuan masyarakat akan pentingnya jaminan sosial serta banyaknya perusahaan yang tidak mendaftarkan pekerjanya dalam program jaminan sosial;
6. Menurunnya alokasi penempatan transmigran.

Perumusan Isu strategis Dinas Tenaga Kerja pada tahun 2024 mengacu pada Rencana Strategis tahun 2024 – 2026 dan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024, Arah Kebijakan Pemerintah Daerah, dan Hasil Evaluasi Capaian Kinerja tahun sebelumnya serta Daftar Risiko tahun 2024. Isu Strategis yang ditangani pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan keterampilan pencari kerja sesuai dengan kebutuhan dunia kerja;
2. Menurunkan kasus perselisihan Hubungan Industrial;
3. Memberikan bantuan Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi petani tembakau dan pekerja rentan;

F. LANDASAN HUKUM

Laporan Kinerja Dinas Tenaga Kerja ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
4. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026
5. Peraturan Bupati Magetan Nomor 16 Tahun 2023 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026;
6. Peraturan Bupati Magetan Nomor 26 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024; dan
7. Keputusan Bupati Magetan 188/394/Kept./403.013/2023 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Magetan dan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang disesuaikan dengan Berita Acara tentang hasil pemetaan Pohon Kinerja Perangkat Daerah Nomor 050/10/403.202/2024 Tanggal 1 Februari 2024

G. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan Tahun n berpedoman pada PERMENPAN-RB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I	<p>PENDAHULUAN</p> <p>Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (<i>strategic issued</i>) yang sedang dihadapi organisasi..</p>
BAB II	<p>PERENCANAAN KINERJA</p> <p>Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.</p>
BAB III	<p>AKUNTABILITAS KINERJA</p> <p>A. Capaian Kinerja Organisasi</p> <p>Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini; 2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir; 3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi; 4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada); 5. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan; 6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; 7. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja). <p>B. Realisasi Anggaran</p> <p>Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.</p>
BAB IV	<p>PENUTUP</p> <p>Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.</p>
LAMPIRAN	<ol style="list-style-type: none"> 1) Perjanjian Kinerja 2) Lain-lain yang dianggap perlu

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2024-2026

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Tujuan dan Sasaran Kepala Daerah dan terintegrasi dengan potensi sumber daya dimiliki dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan. Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan ditetapkan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun yaitu dari tahun 2024-2026.

Adapun Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan yang disusun dalam rangka mendukung Tujuan dan Sasaran Strategis serta Strategi dan Arah Kebijakan yang tertuang dalam RPD Kabupaten Magetan periode 2024-2026 dapat dirumuskan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1
Keterkaitan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan dengan Tujuan dan Sasaran
Bupati Magetan
Tahun 2024-2026

Tujuan ke-2 RPD: T2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing • Indikator: Indeks Pembangunan Manusia
Sasaran ke-3 RPD: T2.S3. Meningkatnya Kualitas SDM Ketenagakerjaan • Indikator: Tingkat Pengangguran Terbuka
Tujuan ke-3 RPD: T3. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Indikator: Persentase Penduduk Miskin
Sasaran ke-2 RPD: T3.S2. Meningkatnya Pendapatan Masyarakat Indikator: Pendapatan Perkapita Sasaran ke-3 RPD: T3.S3. Menurunnya Kantong-Kantong Kemiskinan Indikator: Koefisien Gini/ Indeks Gini
Program Prioritas Pembangunan Daerah RPD: 1. Program Hubungan Industrial 2. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja 3. Program Penempatan Tenaga Kerja

<p>Tujuan OPD: Meningkatkan penyerapan dan partisipasi Angkatan kerja</p> <ul style="list-style-type: none"> • Indikator: Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
<p>Sasaran OPD: Meningkatnya Akses ke Peluang Kerja</p> <ul style="list-style-type: none"> • Indikator: Persentase penyerapan tenaga kerja <p>Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja</p> <ul style="list-style-type: none"> • Indikator: Tingkat produktivitas tenaga kerja <p>Meningkatnya akuntabilitas dan pelayanan publik penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Dinas Tenaga Kerja</p> <ul style="list-style-type: none"> • Indikator: Nilai SAKIP Dinas Tenaga Kerja • Indikator: Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Tenaga Kerja

1. Tujuan dan Sasaran RPD Tahun 2024-2026

Renstra Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan ini ditujukan untuk mewujudkan tujuan RPD T2 yaitu Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing dan T3 Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat, serta mendukung Sasaran RPD T2.S3 Meningkatkan Kualitas SDM Ketenagakerjaan, T3.S2 Meningkatkan Pendapatan Masyarakat, dan T3.S3 Menurunnya Kantong-Kantong Kemiskinan.

Penyusunan Renstra Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan telah melalui tahapan – tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPD Kabupaten Magetan Tahun 2024 – 2026 dengan memperhatikan isu – isu strategis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan.

Selanjutnya Renstra Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan tersebut akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode (satu) tahun. Di dalam Renja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan memuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan dalam satu tahun anggaran.

2. Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Tahun 2024-2026

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Rumusan tujuan dan

sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk mendukung keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan dan sasaran strategis beserta indikator dan target kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan periode 2024-2026. Tujuan dan Sasaran strategis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan dijabarkan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.2
Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja
Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan
Tahun 2024 - 2026

NO	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN RENSTRA		
						2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)	(6)	(7)
1	Meningkatkan penyerapan dan partisipasi angkatan kerja			Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	78,70	78,92	79,14
		1.1	Meningkatnya Akses Ke Peluang Kerja	Persentase penyerapan tenaga kerja	%	75	76	77
		1.2	Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja	Tingkat produktivitas tenaga kerja	juta rp/tenaga kerja	35,35	35,42	35,49
		1.3	Meningkatnya akuntabilitas dan pelayanan publik penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Dinas Tenaga Kerja	Nilai SAKIP Dinas Tenaga Kerja		90,10	90,17	90,24
				Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Tenaga Kerja	85,50	86	86,50	

Sumber : Renstra Dinas Tenaga Kerja periode 2024-2026

3. Strategi dan Arah Kebijakan Tahun 2024-2026

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sementara, kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Dalam kerangka tersebut, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna), sebagai berikut:

Tabel 2.3
Strategi dan Arah Kebijakan
Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan
Tahun 2024 - 2026

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan penyerapan dan partisipasi angkatan kerja	1. Meningkatkan Akses Ke Peluang Kerja	Penguatan layanan penempatan kerja	Menyelenggarakan bursa kerja untuk mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan Optimalisasi pola penempatan AKAL, AKAD, dan AKAN
		Peningkatan akses informasi pasar kerja	Meningkatkan sebaran informasi lowongan dan peluang kerja
		Meningkatkan koordinasi dengan sektor swasta	Membuat program – program kerjasama dengan perusahaan untuk memfasilitasi perekrutan tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar
	2. Meningkatkan Produktivitas Tenaga Kerja	Meningkatkan daya saing tenaga kerja dengan peningkatan kompetensi yang sesuai kebutuhan pasar kerja	Meningkatkan kemampuan tenaga kerja lokal untuk bersaing di pasar tenaga kerja melalui latihan kerja disertai dengan perolehan sertifikat profesi yang sesuai dengan kebutuhan kerja, terutama bagi pencari kerja kalangan miskin

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		Menjaga dan meningkatkan pengelolaan iklim kerja yang kondusif untuk menciptakan hubungan industrial yang harmonis dan berkeadilan serta penguatan, pengelolaan data dan informasi Hubungan Industrial melalui pemberdayaan Lembaga Kerjasama Bipartite dan tripartite, pengesahan Peraturan Perusahaan, peningkatan kepesertaan Jaminan sosial tenaga kerja	Optimalisasi peran Lembaga Kerjasama Bipartite dan Lembaga Kerjasama Tripartite, mendorong perusahaan dalam kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitas sarana kesejahteraan bagi tenaga kerja baik diluar maupun di dalam hubungan kerja, serta pengembangan data dan informasi hubungan industrial dalam pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja Bersama
Meningkatkan kualitas pelayanan publik pada urusan tenaga kerja dan transmigrasi	Meningkatnya kualitas pelayanan public pada urusan tenaga kerja dan transmigrasi	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam memberikan pelayanan	Menyusun standart pelayanan dan prosedur pelayanan yang baik serta meningkatkan kemampuan ASN untuk memberikan pelayanan prima

4. Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024-2026

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah. Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4
Indikator Kinerja Utama
Dinas Tenaga Kabupaten Magetan
Tahun 2024-2026

TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	PENJELASAN		
				DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
Sasaran 1: Meningkatnya Akses Ke Peluang Kerja	1.1	Persentase penyerapan tenaga kerja	%	<p>Pencari kerja adalah angkatan kerja yang sedang menganggur dan mencari pekerjaan baik di dalam atau luar negeri (Perpres No. 36 Tahun 2020)</p> <p>Pencari kerja yang ditempatkan adalah pencari kerja yang diterima bekerja oleh pemberi kerja</p> <p>Pencari kerja terdaftar adalah pencari kerja yang mendaftarkan dan tercatat pada dinas Provinsi/Kabupaten/ Kota yang menangani bidang</p>	$\frac{\sum \text{pencari kerja yang ditempatkan}}{\sum \text{pencari kerja yang terdaftar}} \times 100$	Bidang Pelatihan Kerja Dan Penempatan Tenaga Kerja

TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	PENJELASAN		
				DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
				ketenagakerjaan		
Sasaran 2: Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja	2.1	Tingkat produktivitas tenaga kerja	Juta rp/tenaga kerja	<p>PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai dasar</p> <p>Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.</p>	<p>PDRB tahun berjalan atas dasar harga konstan</p> $\frac{\text{PDRB tahun berjalan}}{\Sigma \text{tenaga kerja}}$	BPS

Sumber : Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja Tahun 2024-2026

B. RENCANA KERJA TAHUN 2024

Rencana Kerja (Renja) Tahunan merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kerja Tahun 2024 termuat di dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2024. Berikut Rencana Kinerja Dinas Tenaga Kerja Tahun 2024:

Tabel 2.3
Rencana Kerja Perubahan Tahun 2024
Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan

NO	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR KINERJA	SAT.	TARGET
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
1	Meningkatkan penyerapan dan partisipasi angkatan kerja			Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	78,70
		1.1	Meningkatnya Akses Ke Peluang Kerja	Persentase penyerapan tenaga kerja	%	75
		1.2	Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja	Tingkat produktivitas tenaga kerja	Juta rp/tenaga kerja	35,35
		1.3	Meningkatnya akuntabilitas dan pelayanan publik penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Dinas Tenaga Kerja	Nilai SAKIP Dinas Tenaga Kerja		90,10
				Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Tenaga Kerja		85,50

Sumber: Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan Tahun 2024

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Perjanjian Kinerja menyajikan Indikator Kinerja Utama yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya, tanpa mengesampingkan indikator lain yang relevan.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan Tahun 2024 mengacu pada dokumen Renstra Dinas Tenaga Kerja Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2024-2026, dokumen Rencana Kinerja (Renja) Tahun 2024, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2024. Pada tanggal 2 bulan Januari tahun 2024 telah ditetapkan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Tenaga Kabupaten Magetan Tahun 2024 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.5
Perjanjian Kinerja
Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan
Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Besaran pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	%	75
2.	Meningkatnya jumlah tenaga kerja yang memiliki kompetensi	Besaran tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi	%	85
3.	Terciptanya hubungan industrial yang harmonis antara pekerja dan pengusaha	Persentase perusahaan yang menerapkan tata Kelola kerja yang layak	%	3,25

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
4.	Meningkatnya jumlah transmigran yang ditempatkan	Persentase transmigran yang ditempatkan	%	33,33
5.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Skor IKM		89,22

Sumber : Perjanjian Kinerja Dinas Tenaga Kerja Tahun 2024

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan. Berikut rincian program dan kegiatan Dinas Tenaga Kerja:

Tabel 2.6
Program, Kegiatan, dan Pagu Anggaran
Dinas Tenaga Kerja
Tahun 2024

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN (RP)
1	2	3	4	5
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kepuasan ASN Dinas Tenaga Kerja terhadap layanan kesekretariatan Dinas Tenaga Kerja	80 indeks	3.182.395.809
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun Tepat Waktu	21 dokumen	50.000.000

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN (RP)
1	2	3	4	5
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Serapan Anggaran Perangkat Daerah	88%	2.413.895.809
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang Menerima Pelayanan Kepegawaian sesuai Prosedur	21 orang	40.000.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 paket	193.000.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 laporan	333.000.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Dipelihara	12 unit	152.500.000
2	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase Dokumen Rencana Tenaga Kerja	100%	70.000.000
	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Yang Disusun	1 dokumen	70.000.000

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN (RP)
1	2	3	4	5
3	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Kompeten	80%	240.000.000
	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase Pencari Kerja yang Mengikuti Pelatihan Berbasis	80%	140.000.000
	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Terakreditasi	7 lembaga	70.000.000
	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kerja yang mengikuti Kegiatan Peningkatan dan Pengukuran Produktivitas	20 orang	30.000.000
4	Program Penempatan Tenaga Kerja	Presentase Pencari Kerja yang Mendapat Fasilitas Penempatan Tenaga Kerja	100%	432.500.000
	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Fasilitas Pelayanan Antar Kerja	300 orang	135.000.000

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN (RP)
1	2	3	4	5
	Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) yang Mendapatkan Izin, Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	5 lembaga	7.500.000
	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah Penyediaan Lowongan Informasi Pasar Kerja	50 lowongan	205.000.000
	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Calon Pekerja Migran (CPMI) dan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	25 orang	85.000.000
5	Program Hubungan Industrial	Presentase Penyelesaian Perselisihan Kasus Ketengakerjaan	100%	122.500.000
	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di	Jumlah perusahaan yang menerapkan tata kelola yang baik	10 perusahaan	10.000.000

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN (RP)
1	2	3	4	5
	Daerah Kabupaten/Kota			
	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kasus ketenagakerjaan secara bipartit	4 perkara	112.500.000
6	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase penempatan transmigran yang terseleksi dan terlatih	100%	92.500.000
	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah calon transmigran yang terseleksi, mendapat pelatihan dan diberangkatkan	3 KK	92.500.000

Sumber: Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2024

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

1. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
2. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);
3. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Pada tanggal 1 (satu) bulan November tahun 2024 telah dilaksanakan dan ditandatangani Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dikarenakan Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi

anggaran). Perubahan kebijakan tersebut mendorong perubahan kebijakan perencanaan dan keuangan Pemerintah Kabupaten Magetan yang diikuti oleh perangkat daerah terkait. Maka, pemerintah daerah melakukan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2024 dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2024, sehingga merubah Daftar Pelaksanaan Anggaran tahun 2024. Adapun perubahan perjanjian kinerja tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2.7
Perubahan Perjanjian Kinerja
Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan
Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Akses Ke Peluang Kerja	Persentase penyerapan tenaga kerja	%	75
2.	Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja	Tingkat produktivitas tenaga kerja	Juta rp/tenaga kerja	35,35
3.	Meningkatnya akuntabilitas dan pelayanan publik penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Dinas Tenaga Kerja	Nilai SAKIP Dinas Tenaga Kerja		90,10
		Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Tenaga Kerja		85,50

Sumber : Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Tenaga Kerja Tahun 2024

Perubahan perjanjian kinerja *Dinas Tenaga Kerja* tahun 2024 ini diikuti oleh perubahan program dan kegiatan sebagai berikut :

Tabel 2.8
Perubahan Program/ Kegiatan/Anggaran
Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan
Tahun 2024

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kepuasan ASN Dinas Tenaga Kerja terhadap layanan kesekretariatan Dinas Tenaga Kerja	80 indeks	3.457.628.590
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun Tepat Waktu	21 dokumen	50.000.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Serapan Anggaran Perangkat Daerah	88%	2.669.128.590
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang Menerima Pelayanan Kepegawaian sesuai Prosedur	21 orang	37.800.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 paket	220.396.750
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 laporan	329.603.250

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Dipelihara	12 unit	150.700.000
2	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase Dokumen Rencana Tenaga Kerja	100%	70.000.000
	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Yang Disusun	1 dokumen	70.000.000
3	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Kompeten	100%	1.168.800.000
	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase Pencari Kerja yang Mengikuti Pelatihan Berbasis	100%	1.068.800.000
	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Terakreditasi	7 lembaga	70.000.000
	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kerja yang mengikuti Kegiatan Peningkatan dan Pengukuran Produktivitas	20 orang	30.000.000
4	Program Penempatan Tenaga Kerja	Presentase Pencari Kerja yang Mendapat Fasilitas Penempatan Tenaga Kerja	100%	432.500.000

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5
	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Fasilitas Pelayanan Antar Kerja	2500 orang	135.000.000
	Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) yang Mendapatkan Izin, Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	5 lembaga	7.500.000
	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah Penyediaan Lowongan Informasi Pasar Kerja	500 lowongan	205.000.000
	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Calon Pekerja Migran (CPMI) dan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	45 orang	85.000.000
5	Program Hubungan Industrial	Presentase Penyelesaian Perselisihan Kasus Ketengakerjaan	100%	257.150.000
	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan	Jumlah perusahaan yang menerapkan tata kelola yang baik	10 perusahaan	247.150.000

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5
	Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota			
	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kasus ketenagakerjaan secara bipartit	4 perkara	10.000.000
6	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase penempatan transmigran yang terseleksi dan terlatih	100%	72.500.000
	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah calon transmigran yang terseleksi, mendapat pelatihan dan diberangkatkan	1 KK	72.500.000

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2024 (setelah perubahan)

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil, maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan dalam sistem akuntabilitas kinerja ini berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah.

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Kepala SKPD menyusun laporan kinerja tahunan berdasarkan perjanjian kinerja yang disepakati dan menyampaikannya kepada Bupati Magetan, paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi *output* dan *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala (triwulan) dan tahunan. Pengukuran dan perbandingan kinerja dalam laporan kinerja harus cukup menggambarkan posisi kinerja instansi pemerintah.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja. Pengukuran kinerja yang dilakukan masih didasarkan pada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja makro diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis. Adapun cara menghitung capaian indikator kinerja dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

Rumus 1: Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase tingkat capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Rumus 2: Apabila semakin rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase tingkat capaian} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Sedangkan pemberian atribut pada capaian masing-masing indikator kinerja, dengan kriteria yaitu:

Tabel 3.1
Kriteria Capaian Kinerja

No	Nilai Capaian Kinerja		Kategori
	%	Keterangan Persentase	
1.	≥ 100%	Sama dengan atau lebih dari 100 persen	Sangat Berhasil
2.	75% s.d < 100%	Tujuh puluh lima persen sampai dengan seratus persen	Berhasil
3.	55% s.d < 75%	Lima puluh lima persen sampai dengan kurang dari tujuh puluh lima persen	Cukup Berhasil
4.	< 55%	Di bawah lima puluh lima persen	Kurang Berhasil

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Dalam laporan ini, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Dinas Tenaga Kerja Tahun 2024 – 2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2024. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi Bupati Magetan. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Tenaga Kerja Tahun 2024.

A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024

1. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Capaian kinerja atas Indikator Kinerja Utama (IKU) dan indikator lain yang relevan yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dan telah diubah dengan Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan tahun 2024 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.2
Capaian Kinerja
Dinas Tenaga Kerja
Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
Meningkatnya Akses Ke Peluang Kerja	Persentase penyerapan tenaga kerja	75 %	76,99%	102,65%	Sangat berhasil	Bidang Pelatihan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja
Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja	Tingkat produktivitas tenaga kerja	35,35 Juta rp/tenaga kerja	37,07 Juta rp/tenaga kerja	104,87%	Sangat berhasil	BPS
Meningkatnya akuntabilitas dan pelayanan publik penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Dinas Tenaga Kerja	Nilai SAKIP Dinas Tenaga Kerja	90,10	90,03	99,92	Berhasil	LHE SAKIP Tahun 2024
	Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Tenaga Kerja	85,50	85,55	100,06	Sangat berhasil	Laporan hasil SKM Dinas Tenaga Kerja

Sasaran 1. Meningkatkan akses ke peluang kerja

Penyerapan tenaga kerja menggambarkan persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota. Pada tahun 2024 jumlah pencari kerja yang terdaftar di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan sebanyak 3.560 orang sedangkan jumlah pencari kerja yang telah diterima bekerja dan ditempatkan di dalam maupun di luar negeri sebanyak 2.741 orang.

Target indikator kinerja persentase penyerapan tenaga kerja pada tahun 2024 adalah 75% dan realisasi sebesar 76,99%, dengan perhitungan :

$$\frac{\text{Pencari kerja yang ditempatkan}}{\text{Pencari kerja yang terdaftar}} \times 100\% = 3.560/2.741 \times 100\% = 76,99\%$$

Sehingga capaian kerja sebesar 102,65% (sangat berhasil). Keberhasilan capaian ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti :

1. Membangun jaringan dan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan lokal dan nasional untuk memfasilitasi penempatan pencari kerja. Ini bisa mencakup penyediaan informasi tentang lowongan pekerjaan, mengadakan job fair, dan memfasilitasi proses rekrutmen dan seleksi.
2. Meningkatkan pelayanan penempatan tenaga kerja melalui AKAD (Antar Kerja Antar Daerah), AKL (Antar Kerja Lokal), dan AKAN (Antar Kerja Antar Negara).
3. Pembinaan penempatan tenaga kerja melalui Bursa Kerja Khusus (BKK).

Sasaran 2. Meningkatnya produktivitas tenaga kerja

Produktivitas tenaga kerja adalah ukuran kinerja ekonomi yang membandingkan jumlah output dengan jumlah tenaga kerja yang digunakan untuk menghasilkan output tersebut, dimana semakin tinggi produktivitasnya menandakan tenaga kerja semakin produktif. Pada tahun 2024 Nilai PDRB sebesar 15.259,86 (miliar Rp) sedangkan jumlah tenaga kerja sebanyak 411.668 orang.

Target indikator kinerja meningkatnya produktivitas tenaga kerja pada tahun 2024 adalah 35,35 juta Rp/ tenaga kerja dan realisasi sebesar 37,07 juta Rp/ tenaga kerja, dengan perhitungan :

$$\frac{\text{PDRB tahun berjalan atas dasar konstan}}{\text{Jumlah tenaga kerja}} = 15.259.860.000.000 / 411.668 = 35,28 \text{ juta Rp/ tenaga kerja}$$

Sehingga capaian kinerja sebesar 104,87% (sangat berhasil). Keberhasilan capaian ini dipengaruhi oleh beberapa factor seperti memberikan pelatihan kerja berbasis kompetensi bagi pencari kerja, bekerjasama dengan BNSP melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja, melaksanakan pelatihan kerja dengan system pemagangan, melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelatihan kerja, serta perlindungan bagi tenaga kerja.

Sasaran 3. Meningkatnya akuntabilitas dan pelayanan publik penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Dinas Tenaga Kerja

Target indikator kinerja Nilai SAKIP Dinas Tenaga Kerja pada tahun 2024 adalah 90,10 dan realisasi sebesar 90,03sehingga capaian kinerja sebesar 99,92% (berhasil), dengan perhitungan :

$$\begin{aligned}
 &= (30\% \times \text{nilai perencanaan kinerja}) + (30\% \times \text{nilai pengukuran kinerja}) + (15\% \times \text{nilai pelaporan kinerja}) + (25\% \times \text{nilai evaluasi akuntabilitas kinerja internal}) \\
 &= 28,23 + 28,50 + 12,15 + 21,25 \\
 &= 90,03
 \end{aligned}$$

Target indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Tenaga Kerja pada tahun 2024 adalah 85,50 dan realisasi sebesar 85,55 sehingga capaian kinerja sebesar 100,06%. IKM adalah hasil survey terhadap layanan pada urusan tenaga kerja dan urusan transmigrasi dengan jumlah responden sebanyak 693 orang.

2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;

Tabel 3.3
Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

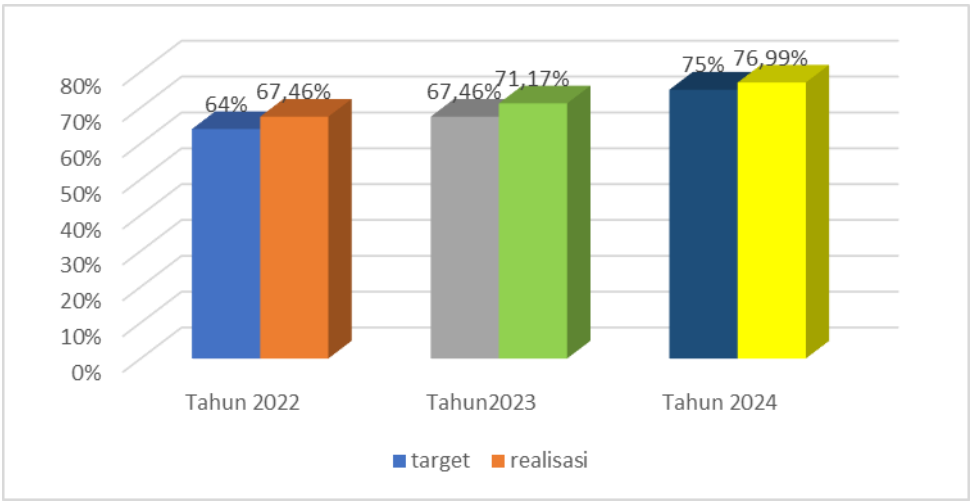
Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Meningkatnya Akses Ke Peluang Kerja	Persentase penyerapan tenaga kerja	64%	67,46 %	105,41	67,46%	71,17%	105,50	75%	76,99%	102,65 %
Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja	Tingkat produktivitas tenaga kerja	-	37,42 Juta rp/tenaga kerja	-	-	35,28 Juta rp/tenaga kerja	-	35,35 Juta rp/tenaga kerja	37,07 Juta rp/tenaga kerja	104,87 %
Meningkatnya akuntabilitas dan pelayanan publik penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Dinas Tenaga Kerja	Nilai SAKIP Dinas Tenaga Kerja	-	86,53	-	-	90,03	-	90,10	90,03	99,92
	Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Tenaga Kerja	81	89,21	110,13	84,39	84,39	100	85,50	85,55	100,06

Keterangan: * sementara menggunakan realisasi tahun sebelumnya karena realisasi tahun 2024 masih menunggu data dari BPS

Perbandingan capaian kinerja pada masing-masing sasaran strategis dapat dijelaskan sebagai berikut :

Sasaran 1. Meningkatnya akses ke peluang kerja

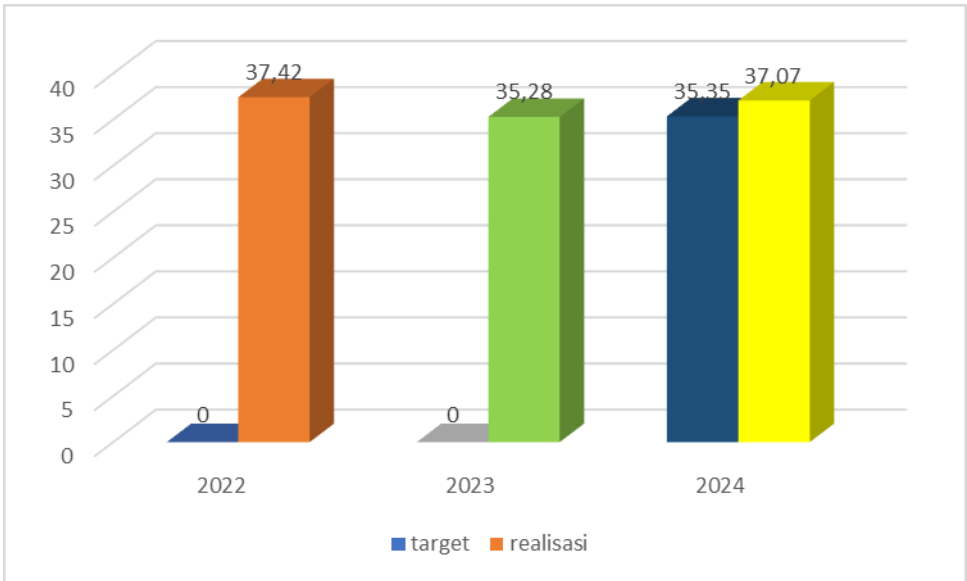
Grafik 3.3.1
Capaian Realisasi Sasaran Strategis 1



Pada realisasi kinerja sasaran pertama meningkatnya akses ke peluang kerja dengan indikator persentase penyerapan tenaga kerja dari tahun 2022 sampai dengan 2024 terus mengalami kenaikan, capaian tahun 2022 sebesar 67,46% tahun 2023 sebesar 71,17% dan tahun 2024 sebesar 76,99%. Peningkatan ini karena Dinas Tenaga Kerja terus berupaya membangun jaringan dan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan lokal dan nasional untuk memfasilitasi penempatan pencari kerja. Ini bisa mencakup penyediaan informasi tentang lowongan pekerjaan, mengadakan job fair, dan memfasilitasi proses rekrutmen dan seleksi, meningkatkan pelayanan penempatan tenaga kerja melalui AKAD (Antar Kerja Antar Daerah), AKL (Antar Kerja Lokal), dan AKAN (Antar Kerja Antar Negara), dan melakukan pembinaan penempatan tenaga kerja melalui Bursa Kerja Khusus (BKK).

Sasaran 2. Meningkatnya produktivitas tenaga kerja

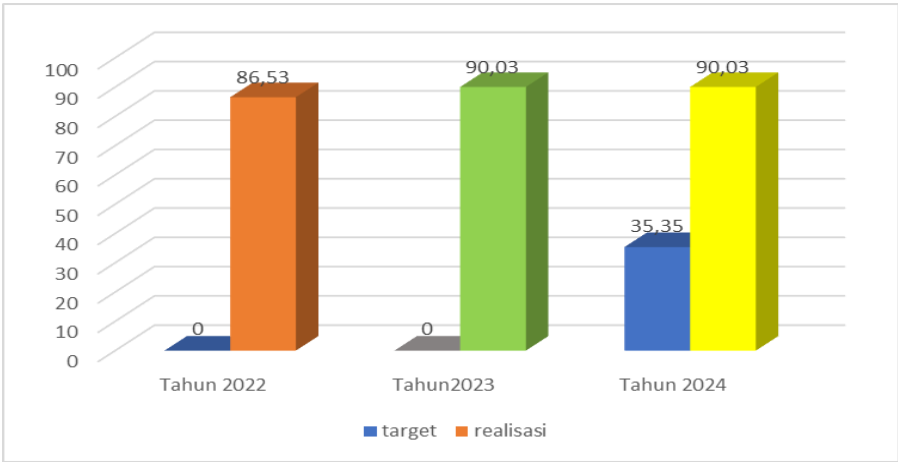
Grafik 3.3.2
Capaian Realisasi Sasaran Strategis 2



Pada realisasi kinerja sasaran kedua meningkatnya produktivitas tenaga kerja dengan indikator tingkat produktivitas tenaga kerja dari tahun 2022 sampai dengan 2024 mengalami fluktuasi. Capaian tahun 2022 sebesar 37,42 menjadi 35,28 pada tahun 2023 dan meningkat menjadi 37,07 pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan produktivitas tenaga kerja, berbagai upaya yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja seperti memberikan pelatihan kerja berbasis kompetensi bagi pencari kerja, bekerjasama dengan BNSP untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja, melaksanakan pelatihan kerja dengan system pemagangan, melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelatihan kerja, serta perlindungan bagi tenaga kerja.

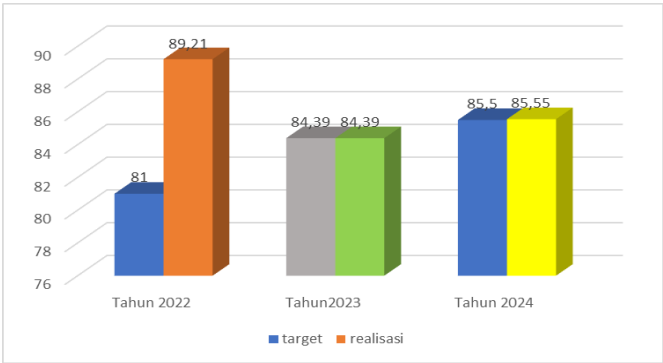
Sasaran 3. Meningkatnya akuntabilitas dan pelayanan publik penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Dinas Tenaga Kerja

Grafik 3.3.3
Capaian Realisasi Sasaran Strategis 3



Pada realisasi kinerja sasaran ketiga meningkatnya akuntabilitas dan pelayanan publik penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Dinas Tenaga Kerja dengan indikator Nilai SAKIP Dinas Tenaga Kerja dari tahun 2022 sampai dengan 2024 terus meningkat. Capaian tahun 2022 adalah 86,53 tahun 2023 dan 2024 adalah 90,03. Peningkatan ini karena upaya untuk meningkatkan budaya kerja di lingkungan Dinas Tenaga Kerja.

Grafik 3.3.3
Capaian Realisasi Sasaran Strategis 3



Realisasi kinerja IKM Dinas Tenaga Kerja mengalami fluktuasi. Capaian pada tahun 2022 adalah 89,21 tahun 2023 adalah 84,39 dan meningkat pada tahun 2024 menjadi 85,55. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan terus berusaha meningkatkan kualitas pelayanan dan kepuasan para pengguna layanan dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang memberikan pelayanan dan meningkatkan sarana prasarana penunjang pelayanan, sehingga diharapkan mampu mempertahankan dan meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan.

3. Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

Tabel 3.4
Tingkat Kemajuan Capaian Kinerja dengan Akhir Tahun Rencana Strategis

No .	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Target Akhir renstra	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6=4/5*100
1	Meningkatnya Akses Ke Peluang Kerja	Persentase penyerapan tenaga kerja	76,99%	77%	99,99%
2	Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja	Tingkat produktivitas tenaga kerja	37,07 Juta rp/tenaga kerja	35,49 Juta rp/tenaga kerja	104,45%
3	Meningkatnya akuntabilitas dan pelayanan publik penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Dinas Tenaga Kerja	Nilai SAKIP Dinas Tenaga Kerja	90,03	90,24	99,77%
		Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Tenaga Kerja	85,55	86,50	98,84%

Berdasarkan tabel di atas capaian kinerja pada :

1. Persentase penyerapan tenaga kerja realisasi tahun 2024 adalah 76,99% belum mencapai target akhir Renstra yaitu 77%, maka diperlukan 0,01 poin atau 0,01% lagi untuk mencapai target akhir Renstra.
2. Tingkat produktivitas tenaga kerja realisasi tahun 2024 adalah 35,28 juta rp/tenaga kerja telah melebihi target akhir Renstra yaitu 35,49 juta rp/tenaga kerja.
3. Nilai SAKIP Dinas Tenaga Kerja tahun 2024 adalah 90,03 belum mencapai target akhir Renstra yaitu 90,24, maka diperlukan 0,21 poin atau 0,23% lagi untuk mencapai target akhir Renstra.

4. IKM Dinas Tenaga Kerja realisasi tahun 2024 adalah 85,55 belum mencapai belum mencapai target akhir Renstra yaitu , maka diperlukan 0,21 poin atau 1,16% lagi untuk mencapai target akhir Renstra.

4. **Perbandingan antara realisasi kinerja tahun n dengan standar nasional, standar Provinsi atau capaian kinerja Pemerintah Daerah sekitarnya;**

Tabel 3.5
Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/ Provinsi/ Kabupaten/Kota lain
(Bila Ada)

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024	Standar Nasional/ Provinsi/ Daerah lain	% Capaian
1	2	3	4	5	6=4/5*100
1	Meningkatnya Akses ke Peluang Kerja	Persentase penyerapan tenaga kerja	76,99%	69,69% (Kab. Ponorogo)	110,47%
2	Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja	Tingkat produktivitas tenaga kerja	37,07 Juta rp/tenaga kerja	28,06 Juta rp/tenaga kerja (Kab. Ponorogo)	132,11%

Persentase penyerapan tenaga kerja tahun 2024 Kabupaten Magetan sebesar 76,99% lebih tinggi dari persentase penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Ponorogo yaitu sebesar 69,69%.

Tingkat produktivitas tenaga kerja tahun 2024 di Kabupaten Magetan sebesar 37,07 juta rp/tenaga kerja di atas Tingkat produktivitas tenaga kerja Kabupaten Ponorogo sebesar 28,06 07 juta rp/tenaga.

5. **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;**

Tabel 3.6
Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Penyebab Keberhasilan/Kegagalan
Meningkatnya Akses Ke Peluang Kerja	Persentase penyerapan tenaga kerja	75%	76,99%	102,65%	1. Peningkatan penyediaan informasi lowongan kerja 2. Pelaksanaan job fair 3. Fasilitasi proses rekrutmen dan seleksi. 4. Peningkatan pelayanan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Penyebab Keberhasilan/Kegagalan
					penempatan tenaga kerja melalui AKAD (Antar Kerja Antar Daerah), AKL (Antar Kerja Lokal), dan AKAN (Antar Kerja Antar Negara). 5. Pembinaan penempatan tenaga kerja melalui Bursa Kerja Khusus (BKK).
Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja	Tingkat produktivitas tenaga kerja	35,35 Juta rp/tenaga kerja	37,07 Juta rp/tenaga kerja	104,87%	1. Adanya Pelatihan kerja berbasis kompetensi bagi pencari kerja 2. Menjalin kerjasama dengan BNSP untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja 3. Melaksanakan pelatihan kerja dengan system pemagangan 4. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelatihan kerja 5. Meningkatkan perlindungan bagi tenaga kerja
Meningkatnya akuntabilitas dan pelayanan publik penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai SAKIP Dinas Tenaga Kerja	90,10	90,03	99,92%	Masih kurangnya evaluasi internal
	Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Tenaga Kerja	85,50	85,55	100,06%	1. Ketersediaan SDM yang kompeten dalam memberikan pelayanan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Penyebab Keberhasilan/Kegagalan
pada Dinas Tenaga Kerja	Kerja				2. Peningkatan sarana prasarana penunjang pelayanan

Sasaran 1. Meningkatnya akses ke peluang kerja

Target indikator kinerja Persentase penyerapan tenaga kerja pada tahun 2024 adalah 75% dan realisasi sebesar 76,99% sehingga capaian kinerja sebesar 102,65%. Capaian diatas target karena adanya peningkatan penyediaan informasi lowongan kerja, pelaksanaan job fair, fasilitasi proses rekrutmen dan seleksi, peningkatan pelayanan penempatan tenaga kerja melalui AKAD (Antar Kerja Antar Daerah), AKL (Antar Kerja Lokal), dan AKAN (Antar Kerja Antar Negara), serta pembinaan penempatan tenaga kerja melalui Bursa Kerja Khusus (BKK).

Sasaran 2. Meningkatnya produktivitas tenaga kerja

Target indikator kinerja meningkatnya produktivitas tenaga kerja pada tahun 2024 adalah 35,35 juta Rp/ tenaga kerja dan realisasi sebesar 37,07 juta Rp/ tenaga kerja, sehingga capaian kinerja sebesar 104,87%. Capaian melebihi target karena adanya pelatihan kerja berbasis kompetensi bagi pencari kerja, terjalinnya kerjasama dengan BNSP untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja, melaksanakan pelatihan kerja dengan system pemagangan, melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelatihan kerja, serta perlindungan bagi tenaga kerja.

Sasaran 3. Meningkatnya akuntabilitas dan pelayanan publik penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Dinas Tenaga Kerja

Target indikator kinerja Nilai SAKIP Dinas Tenaga Kerja pada tahun 2024 adalah 90,10 dan realisasi sebesar 90,03sehingga capaian kinerja sebesar 99,92%. Capaian dibawah target karena masih kurangnya evaluasi internal.

Target indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Tenaga Kerja pada tahun 2024 adalah 85,50 dan realisasi sebesar 85,55 sehingga capaian kinerja sebesar 100,06%. Capaian di atas target karena ketersediaan SDM yang kompeten dalam memberikan pelayanan dan peningkatan sarana prasarana penunjang pelayanan.

Alternatif solusi kebijakan yang telah dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan pencapaian kinerja, pada tabel berikut:

Tabel 3.7
Permasalahan pencapaian kinerja dan Alternatif solusi kebijakan yang telah dilakukan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Permasalahan dalam pencapaian Indikator Kinerja	Alternatif Solusi
Meningkatnya Akses Ke Peluang Kerja	Persentase penyerapan tenaga kerja	-	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan penyediaan informasi lowongan kerja 2. Pelaksanaan job fair 3. Fasilitasi proses rekrutmen dan seleksi 4. Peningkatan pelayanan penempatan tenaga kerja melalui AKAD (Antar Kerja Antar Daerah) dan AKN (Antar Kerja Antar Negara), 5. Pembinaan penempatan tenaga kerja melalui Bursa Kerja Khusus (BKK)
Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja	Tingkat produktivitas tenaga kerja	-	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan Pelatihan kerja berbasis kompetensi 2. Melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja 3. Melaksanakan pelatihan kerja dengan system pemagangan 4. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelatihan kerja 5. Meningkatkan perlindungan bagi tenaga kerja
Meningkatnya akuntabilitas dan pelayanan publik penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Dinas Tenaga Kerja	Nilai SAKIP Dinas Tenaga Kerja	Kurangnya evaluasi kinerja internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pemantauan rencana aksi 2. Mengevaluasi rencana aksi
	Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Tenaga Kerja	Belum adanya evaluasi terhadap pelayanan secara berkala	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan evaluasi terhadap pelayanan secara berkala 2. Menindaklanjuti rekomendasi hasil survey

Dalam mencapai target kinerja sasaran yang telah ditetapkan terdapat beberapa permasalahan dan alternatif solusi agar tidak menghambat pencapaian kinerja. Sesuai tabel di atas permasalahan dan alternatif solusi yang diambil dalam pencapaian target kinerja dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Pada pencapaian sasaran pertama yaitu meningkatnya akses ke peluang kerja tidak terdapat permasalahan sehingga kinerja dapat berjalan dengan baik dan mampu mencapai target yang telah ditetapkan.
2. Pada pencapaian sasaran kedua yaitu meningkatnya produktivitas tenaga kerja tidak terdapat permasalahan sehingga kinerja dapat berjalan dengan baik dan mampu mencapai target yang telah ditetapkan.
3. Pada pencapaian sasaran ketiga yaitu meningkatnya akuntabilitas dan pelayanan publik penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Dinas Tenaga Kerja dengan indikator pertama yaitu Nilai SAKIP Dinas Tenaga Kerja terdapat permasalahan yaitu kurangnya evaluasi kinerja internal. Untuk menyikapi permasalahan tersebut dicari alternatif penyelesaian yaitu melakukan pemantauan rencana aksi dan mengevaluasi rencana aksi. Sedangkan untuk indikator kedua Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Tenaga Kerja terdapat permasalahan yaitu belum adanya evaluasi terhadap pelayanan secara berkala dan untuk menyikapi permasalahan tersebut dicari alternatif solusi yaitu melaksanakan evaluasi terhadap pelayanan secara berkala dan menindaklanjuti rekomendasi hasil survey.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Tabel 3.8
Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Anggaran (Rp)	Menunjang/ Tidak Menunjang
Meningkatnya Akses Ke Peluang Kerja	Persentase penyerapan tenaga kerja	102,65 %	Program Penempatan Tenaga Kerja	Presentase Pencari Kerja yang Mendapat Fasilitas Penempatan Tenaga Kerja	100%	432.500.000	Menunjang

Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Anggaran (Rp)	Menunjang/ Tidak Menunjang
			Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Fasilitas Pelayanan Antar Kerja	142,4%	135.000.000	Menunjang
			Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) yang Mendapatkan Izin, Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	100%	7.500.000	Menunjang
			Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah Penyediaan Lowongan Informasi Pasar Kerja	81,40	205.000.000	Menunjang
			Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Calon Pekerja Migran (CPMI) dan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	100%	85.000.000	Menunjang
			Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase penempatan transmigran yang terseleksi dan terlatih	100%	72.500.000	Menunjang

Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Anggaran (Rp)	Menunjang/ Tidak Menunjang
			Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah calon transmigran yang terseleksi, mendapat pelatihan dan diberangkatkan	100%	72.500.000	Menunjang
			Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase Dokumen Rencana Tenaga Kerja	100%	70.000.000	Menunjang
			Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Yang Disusun	100%	70.000.000	Menunjang
Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja	Tingkat produktivitas tenaga kerja	99,80%	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Kompeten	100%	1.168.800.000	Menunjang
			Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase Pencari Kerja yang Mengikuti Pelatihan Berbasis	100%	1.068.800.000	Menunjang
			Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Terakreditasi	100%	70.000.000	Menunjang
			Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kerja yang mengikuti Kegiatan Peningkatan dan Pengukuran Produktivitas	100%	30.000.000	Menunjang

Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Anggaran (Rp)	Menunjang/ Tidak Menunjang
			Program Hubungan Industrial	Presentase Penyelesaian Perselisihan Kasus Ketengakerjaan	100%	257.150.000	Menunjang
			Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perusahaan yang menerapkan tata kelola yang baik	100%	10.000.000	Menunjang
			Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kasus ketenagakerjaan secara bipartit	100%	247.150.000	Menunjang
Meningkatnya akuntabilitas dan pelayanan publik penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Dinas Tenaga Kerja	Nilai SAKIP Dinas Tenaga Kerja	99,92	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kepuasan ASN Dinas Tenaga Kerja terhadap layanan kesekretariatan Dinas Tenaga Kerja	103,26	3.457.628.590	Menunjang
	Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Tenaga Kerja	100,06	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	109,52	50.000.000	Menunjang

Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Anggaran (Rp)	Menunjang/ Tidak Menunjang
				yang Disusun Tepat Waktu			
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Serapan Anggaran Perangkat Daerah	106,59	2.669.128.590	Menunjang
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang Menerima Pelayanan Kepegawaian sesuai Prosedur	100	37.800.000	Menunjang
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	220.396.750	Menunjang
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	329.603.250	Menunjang
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Dipelihara	100	150.700.000	Menunjang

Untuk mencapai sasaran kinerja diperlukan dukungan program kegiatan sebagai berikut :

Sasaran meningkatnya akses ke peluang kerja didukung oleh program/ kegiatan :

- Program Program Penempatan Tenaga Kerja dengan kegiatan Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota, Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota, Pengelolaan Informasi Pasar Kerja, dan Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota
- Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi dengan kegiatan Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
- Program Perencanaan Tenaga Kerja dengan kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)

Sasaran meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja didukung oleh program/ kegiatan :

- Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja dengan kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi, Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta, dan Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- Program Hubungan Industrial dengan kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota serta kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Sasaran Meningkatnya akuntabilitas dan pelayanan publik penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Dinas Tenaga Kerja didukung oleh program/ kegiatan :

- Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota dengan kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah, kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah, administrasi kepegawaian perangkat daerah, administrasi umum, penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah, dan kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah.

B. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2024

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.9
Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan
Tahun 2024

No.	Program/Kegiatan	Bidang Pengampu	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Sekretariat	3.457.628.590	3.298.398.093	95,39
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat	50.000.000	46.747.175	93,49
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Sekretariat	2.669.128.590	2.564.060.001	96,06
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Sekretariat	37.800.000	32.184.000	85,14
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Sekretariat	220.396.750	213.814.185	97,01
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sekretariat	329.603.250	294.738.363	89,42
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sekretariat	150.700.000	146.854.369	97,45
2	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Sekretariat	70.000.000	64.625.341	92,32

No.	Program/Kegiatan	Bidang Pengampu	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Sekretariat	70.000.000	64.625.341	92,32
3	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Bidang Pelatihan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja	1.168.800.000	1.030.647.945	88,18
	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Bidang Pelatihan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja	1.068.800.000	935.956.695	87,57
	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Bidang Pelatihan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja	70.000.000	66.423.300	94,89
	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bidang Pelatihan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja	30.000.000	28.267.950	94,23
4	Program Penempatan Tenaga Kerja	Bidang Pelatihan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja	432.500.000	422.186.316	97,62
	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Bidang Pelatihan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja	135.000.000	130.310.950	96,53
	Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Bidang Pelatihan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja	7.500.000	7.420.000	98,93
	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Bidang Pelatihan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja	205.000.000	203.611.638	99,32
	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Bidang Pelatihan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja	85.000.000	80.843.728	95,11
5	Program Hubungan Industrial	Bidang Hubungan Industrial, Syarat Kerja Dan Transmigrasi	257.150.000	252.383.750	98,15
	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Bidang Hubungan Industrial, Syarat Kerja Dan Transmigrasi	247.150.000	242.385.550	98,07
	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Bidang Hubungan Industrial, Syarat Kerja Dan Transmigrasi	10.000.000	9.998.200	99,98

No.	Program/Kegiatan	Bidang Pengampu	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
6	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Bidang Hubungan Industrial, Syarat Kerja Dan Transmigrasi	72.500.000	51.831.250	71,49
	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Bidang Hubungan Industrial, Syarat Kerja Dan Transmigrasi	72.500.000	51.831.250	71,49

C. EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA TAHUN 2024

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian sasaran perangkat daerah disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.9
Efisiensi Kinerja Sasaran
Tahun 2024

Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	%Capaian	Anggaran	Realisasi	%Capaian	
					(Rp.)	(Rp.)		
Meningkatnya Akses Ke Peluang Kerja	Persentase penyerapan tenaga kerja	75 %	76,99 %	102,65	575.000.000	538.642.907	93,68	8,74
Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja	Tingkat produktivitas tenaga kerja	35,35 Juta rp/tenaga kerja	37,07 Juta rp/tenaga kerja	104,87	1.425.950.000	1.283.031.695	89,98	19,68
Meningkatnya akuntabilitas dan pelayanan publik penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Dinas Tenaga Kerja	Nilai SAKIP Dinas Tenaga Kerja	90,10	90,03	99,92	3.457.628.590	3.298.398.093	95,39	4,15
	Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Tenaga Kerja	85,50	85,55	100,06				
Efisiensi total				101,88			93,80	8,61

Berdasarkan tabel 3.9 diatas, efisiensi kinerja dihitung dengan menggunakan rumus sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214 Tahun 2017 dan hasilnya dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Sasaran kinerja meningkatnya akses ke peluang kerja mempunyai capaian kinerja sebesar 102,65% dan persentase penyerapan anggaran sebesar 96%, sehingga dapat diketahui Tingkat efisiensinya adalah 8,74%.
2. Sasaran kinerja meningkatnya produktivitas tenaga kerja mempunyai capaian kinerja sebesar 104,87% dan persentase penyerapan anggaran sebesar 89,98%, sehingga dapat diketahui Tingkat efisiensinya adalah 19,68%.
3. Sasaran kinerja Meningkatnya akuntabilitas dan pelayanan publik penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Dinas Tenaga Kerja pada indikator Nilai SAKIP Dinas Tenaga Kerja mempunyai capaian kinerja sebesar 99,92% dan indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Tenaga Kerja sebesar 100,06%, sedangkan persentase penyerapan anggaran sebesar 95,39% sehingga dapat diketahui Tingkat efisiensinya adalah 4,15%.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian kinerja program dan kegiatan perangkat daerah disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.10
Efisiensi Kinerja Program dan Kegiatan
Tahun 2024

No.	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	%Capaian	Anggaran	Realisasi	%Capaian	
					(Rp.)	(Rp.)		
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	80 indeks	82,62 indeks	103,26	3.457.628.590	3.298.398.093	95,39	7,62%
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21 dokumen	23 dokumen	109,52	50.000.000	46.747.175	93,49	14,63%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	88%	93,80%	106,59	2.669.128.590	2.564.060.001	96,06	9,88%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	21 orang	21 orang	100	37.800.000	32.184.000	85,14	14,86%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 paket	12 paket	100	220.396.750	213.814.185	97,01	2,99%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 laporan	12 laporan	100	329.603.250	294.738.363	89,42	10,58%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 unit	12 unit	100	150.700.000	146.854.369	97,45	2,55%
2	Program Perencanaan Tenaga Kerja	100%	100%	100%	70.000.000	64.625.341	92,32	7,68%
	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	1 dokumen	1 dokumen	100%	70.000.000	64.625.341	92,32	7,68%

No.	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	%Capa	Anggaran	Realisasi	%Capaian	
3	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	100%	100%	100%	1.168.800.000	1.030.647.945	88,18	11,82%
	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	100%	100%	100%	1.068.800.000	935.956.695	87,57	12,43
	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	7 lembaga	7 lembaga	100%	70.000.000	66.423.300	94,89	5,11%
	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	20 orang	20 orang	100%	30.000.000	28.267.950	94,23	5,77%
4	Program Penempatan Tenaga Kerja	100%	100%	100%	432.500.000	422.186.316	97,62	2,38%
	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	2500 orang	3560 orang	142,4%	135.000.000	130.310.950	96,53	32,21%
	Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	5 lembaga	5 lembaga	100%	7.500.000	7.420.000	98,93	1,07%
	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	500 lowongan	407 lowongan	81,40	205.000.000	203.611.638	99,32	-22,02%
	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	45 orang	45 orang	100%	85.000.000	80.843.728	95,11	4,89%
5	Program Hubungan Industrial	100%	100%	100%	257.150.000	252.383.750	98,15	1,85%
	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	10 perusahaan	10 perusahaan	100%	247.150.000	242.385.550	98,07	1,93%
	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	4 perkara	4 perkara	100%	10.000.000	9.998.200	99,98	0,02%
6	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	100%	100%	100%	72.500.000	51.831.250	71,49	28,51%
	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 KK	1 KK	100%	72.500.000	51.831.250	71,49	28,51%

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan ditetapkan juga target indikator pada setiap program dan kegiatan. Dari tabel 3.10 di atas dapat diketahui bahwa seluruh program sudah mencapai target yang ditetapkan dengan efisiensi anggaran yang telah dilakukan. Berdasarkan tabel 3.10 di atas efisiensi dalam rangka pencapaian kinerja program dan kegiatan perangkat daerah dihitung dengan menggunakan rumus sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214 Tahun 2017 dan hasilnya dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota menghasilkan capaian kinerja sebesar 103,26% dengan persentase capaian penyerapan anggaran sebesar 95,39%, sehingga dapat diketahui tingkat efisiensi sebesar 7,62%. Dari capaian tersebut dapat diketahui bahwa seluruh kegiatan yang ada pada program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota dapat berjalan dengan baik sesuai dengan yang telah direncanakan.
2. Program perencanaan tenaga kerja menghasilkan capaian kinerja sebesar 100% dengan persentase capaian serapan anggaran sebesar 93,32%, sehingga dapat diketahui tingkat efisiensi sebesar 7,68%. Dari capaian tersebut dapat diketahui bahwa kegiatan yang ada pada program perencanaan tenaga kerja dapat berjalan dengan baik sesuai dengan yang telah direncanakan.
3. Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja menghasilkan capaian kinerja 100% dengan persentase serapan anggaran sebesar 88,18%, sehingga dapat diketahui tingkat efisiensi sebesar 11,18%. Dari capaian tersebut dapat diketahui bahwa kegiatan yang ada pada program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja dapat berjalan dengan baik sesuai dengan yang telah direncanakan.
4. Program penempatan tenaga kerja menghasilkan capaian kinerja 100% dengan persentase serapan anggaran sebesar 97,62%, sehingga dapat diketahui Tingkat efisiensi sebesar 2,38%. Dari capaian tersebut dapat diketahui bahwa kegiatan yang ada pada program penempatan tenaga kerja terdapat 1 (satu) kegiatan yang kurang berjalan dengan baik dan belum sesuai dengan yang telah direncanakan, yaitu kegiatan pengelolaan informasi pasar kerja, dari target indikator penyediaan lowongan informasi pasar kerja sebanyak 500 lowongan kerja hanya terealisasi sebanyak 407 lowongan kerja.
5. Program hubungan industrial menghasilkan capaian kinerja sebesar 100% dengan persentase capaian penyerapan anggaran sebesar 98,15%, sehingga dapat diketahui Tingkat efisiensi sebesar 1,85%. Dari capaian tersebut dapat diketahui bahwa kegiatan yang ada pada program hubungan industrial dapat berjalan dengan baik sesuai dengan yang telah direncanakan.
6. Program Pembangunan Kawasan transmigrasi menghasilkan capaian kinerja sebesar 100% dengan capaian serapan anggaran sebesar 71,49%, sehingga dapat diketahui Tingkat efisiensi sebesar 28,51%. Dari capaian tersebut dapat diketahui bahwa

kegiatan yang ada pada program Pembangunan Kawasan transmigrasi dapat berjalan dengan baik sesuai dengan yang telah direncanakan.

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Tenaga Kabupaten Magetan Tahun 2024 ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKjIP Tahun 2024 ini dapat menggambarkan pencapaian kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan dan evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai, yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja baik kinerja sasaran, kinerja program, maupun kinerja kegiatan.

A. SIMPULAN

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan telah menetapkan tujuan dan sasaran beserta indikator kinerjanya di dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2024-2026 dan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 dalam rangka mendukung Tujuan dan Sasaran Kabupaten Magetan yang termuat dalam RPD Kabupaten Magetan Tahun 2024-2026 yang kemudian diturunkan ke dalam Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang didalamnya menyajikan Indikator Kinerja Utama yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya, tanpa mengesampingkan indikator lain yang relevan. Pada tahun 2024, pengukuran kinerja dilakukan terhadap 1 (satu) tujuan, 3 (tiga) sasaran dengan menggunakan 4 (empat) indikator kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Dari 4 (empat) indikator kinerja yang diukur, hasilnya adalah sebagai berikut :

Sasaran 1: Meningkatkan Akses Ke Peluang Kerja

- Sasaran ke-1 Meningkatnya akses ke peluang kerja terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 102,65% (kategori sangat berhasil);
- Indikator kinerja telah mencapai target;
- Sasaran ke-1 didukung oleh 3 (tiga) Program yang terdiri dari 3 indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 100% (kategori berhasil)
- Sasaran ke-1 didukung oleh 6 (enam) kegiatan yang terdiri dari 6 (enam) indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 103,97 % (kategori sangat berhasil)

Sasaran 2: Meningkatkan produktivitas tenaga kerja

- Sasaran ke-2 terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 104,87% (kategori sangat berhasil);
- Indikator kinerja telah mencapai target;
- Sasaran ke-2 didukung oleh 2 (dua) Program yang terdiri dari 2 indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 100% (kategori berhasil)

- Sasaran ke-2 didukung oleh 5 (lima) kegiatan yang terdiri dari 5 (lima) indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 100% (kategori berhasil)

Sasaran 3: Meningkatnya akuntabilitas dan pelayanan public penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Dinas Tenaga Kerja

- Sasaran ke-3 terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 99,54% (kategori berhasil);
- Sebanyak 2 (dua) indikator kinerja telah mencapai target dan sebanyak 1 (satu) indikator kinerja belum mencapai target;
- Sasaran ke-3 didukung oleh 1 (dua) Program yang terdiri dari 2 indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 103,26% (kategori sangat berhasil)
- Sasaran ke-3 didukung oleh 5 (lima) kegiatan yang terdiri dari 6 (enam) indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 102,69% (kategori sangat berhasil)

Tabel 4.1
Capaian Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan
Tahun 2024

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja %
Meningkatnya Akses Ke Peluang Kerja	Persentase penyerapan tenaga kerja	75 %	76,99%	102,65%
Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja	Tingkat produktivitas tenaga kerja	35,35 Juta rp/tenaga kerja	37,07 Juta rp/tenaga kerja	104,87%
Meningkatnya akuntabilitas dan pelayanan publik penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Dinas Tenaga Kerja	Nilai SAKIP Dinas Tenaga Kerja	90,10	90,03	99,92
	Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Tenaga Kerja	85,50	85,55	100,06
Capaian Kinerja				101,88
				SANGAT BAIK

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian kinerja 3 (tiga) sasaran tersebut, secara umum telah mencapai target capaian kinerja dengan capaian kinerja rata-rata sebesar 101,88% dengan serapan anggaran sebesar Rp. 5.120.072.695,- dan mencapai efisiensi kinerja sebesar 8,61%.

Capaian kinerja rata-rata tahun 2024 adalah 101,88%, naik 1,24% jika dibandingkan capaian kinerja tahun 2023 sebesar 100,64%. Namun Capaian kinerja tahun ini tidak bisa dibandingkan dengan tahun lalu dikarenakan adanya perbedaan sasaran strategis dan indicator.

Serapan anggaran tahun 2024 adalah 90,80%, turun 0,12% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 93,92%. Penyebab utama permasalahan ini adalah efisiensi, sisa kontrak, sisa gaji, dan ada 1 (satu) pelatihan dari pokir yang tidak bisa dilaksanakan karena disposisi Bupati belum turun. Berkaitan dengan permasalahan tersebut Dinas Tenaga Kerja akan meningkatkan koordinasi dan pencermatan secara berkala terkait penyerapan anggaran.

B. RENCANA AKSI TAHUN 2025

Atas dasar pencapaian kinerja tahun 2024 tersebut, rencana aksi yang akan dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerjanya antara lain:

Tabel 4.2
Rencana Aksi Peningkatan Kinerja
Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan
Tahun 2025

Tujuan & Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Rencana Aksi Tahun 2025
Meningkatnya Akses Ke Peluang Kerja	Persentase penyerapan tenaga kerja	Meningkatkan penyediaan informasi tentang lowongan pekerjaan Mengadakan job fair Memfasilitasi proses rekrutmen dan seleksi. Meningkatkan pelayanan penempatan tenaga kerja melalui AKAD (Antar Kerja Antar Daerah), AKL (Antar Kerja Lokal), dan AKAN (Antar Kerja Antar Negara). Pembinaan penempatan tenaga kerja melalui Bursa Kerja Khusus (BKK).
Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja	Tingkat produktivitas tenaga kerja	Melaksanakan pelatihan berbasis kompetensi Mengadakan bimtek metodologi instruktur LPK swasta Melaksanakan penyuluhan/sosialisasi produktivitas kepada perusahaan mikro dan kecil Perlindungan tenaga kerja
Meningkatnya akuntabilitas dan pelayanan publik penyelenggaraan pemerintahan	Nilai SAKIP Dinas Tenaga Kerja	Melakukan pemantauan rencana aksi Mengevaluasi rencana aksi

daerah pada Dinas Tenaga Kerja	Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Tenaga Kerja	Meningkatkan pelayanan public kepada masyarakat Menindaklanjuti rekomendasi hasil survey Melaksanakan survey kepuasan masyarakat Melaksanakan evaluasi terhadap pelayanan secara berkala
-----------------------------------	---	---

Atas rencana aksi tersebut, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan menyusun target waktu pencapaian indikator kinerja sasaran Tahun 2025 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.3.
Target Waktu Pencapaian Indikator Kinerja
Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan
Tahun 2025

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2025				
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TOTAL
Meningkatnya Akses Ke Peluang Kerja	Persentase penyerapan tenaga kerja	-	-	-	77,50%	77,50%
Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja	Tingkat produktivitas tenaga kerja	-	-	-	35,42 juta rp/ tenaga kerja	35,42 juta rp/ tenaga kerja
Meningkatnya akuntabilitas dan pelayanan publik penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Dinas Tenaga Kerja	Nilai SAKIP Dinas Tenaga Kerja	-	-	-	90,17	90,17
	Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Tenaga Kerja	-	-	86	-	86

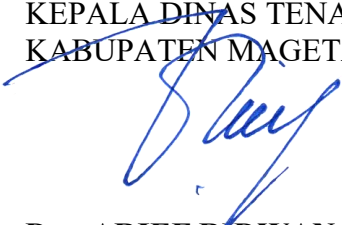
Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan kepada pihak-pihak terkait baik para *stakeholders* maupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Magetan. Harapan kami, dari hasil pengukuran kinerja yang tertuang dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan rencana aksi yang akan dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan ini dapat memperbaiki dan meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.

Magetan,

Januari 2025

KEPALA DINAS TENAGA KERJA

KABUPATEN MAGETAN



Drs. ARIEF RIDWAN, MM

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP 196605161986031005

LAMPIRAN:
A. Matriks Renstra Terakhir

Tabel T-C.27
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja
Kabupaten Magetan

TUJUAN	SASARAN	KODE					PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	Baselin e (2022)	TARGET KINERJA						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
										2024		2025		2026				
										TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
Sebelum Perubahan																		
Meningkatkan kualitas pelayanan publik pada urusan tenaga kerja dan transmigrasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik pada urusan tenaga kerja dan transmigrasi	2	07				Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kepuasan ASN Disnaker terhadap Layanan Kesekretariatan Disnaker Indeks		80	2.213.928.978	81	2.213.928.978	82	2.213.928.978	82	6.641.786.934	Dinas Tenaga Kerja
		2	07	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun Tepat Waktu Dokumen		21	55.000.000	21	55.000.000	21	55.000.000	63	165.000.000	Dinas Tenaga Kerja
		2	07	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen		13	25.000.000	13	25.000.000	13	25.000.000	39	75.000.000	Dinas Tenaga Kerja
		2	07	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Laporan		8	30.000.000	8	30.000.000	8	30.000.000	24	90.000.000	Dinas Tenaga Kerja
		2	07	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Serapan Anggaran Perangkat Daerah %		88	1.460.428.978	89	1.460.428.978	90	1.460.428.978	90	4.381.286.934	Dinas Tenaga Kerja
		2	07	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Orang		21	1.455.428.978	19	1.455.428.978	18	1.455.428.978	58	4.366.286.934	Dinas Tenaga Kerja

TUJUAN	SASARAN	KODE						PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	Baselin e (2022)	TARGET KINERJA						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		2	07	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Laporan		61	5.000.000	61	5.000.000	61	5.000.000	183	15.000.000	Dinas Tenaga Kerja	
		2	07	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang Menerima Pelayanan Kepegawaian sesuai Prosedur Orang		21	50.000.000	19	50.000.000	18	50.000.000	58	150.000.000	Dinas Tenaga Kerja	
		2	07	01	2.05	09	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasar tugas dan fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan Orang		4	20.000.000	4	20.000.000	4	20.000.000	12	60.000.000	Dinas Tenaga Kerja	
		2	07	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan Orang		30	30.000.000	30	30.000.000	30	30.000.000	90	90.000.000	Dinas Tenaga Kerja	
		2	07	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Paket		12	189.900.000	12	189.900.000	12	189.900.000	36	569.700.000	Dinas Tenaga Kerja	
		2	07	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Paket		2	8.000.000	2	8.000.000	2	8.000.000	6	24.000.000	Dinas Tenaga Kerja	
		2	07	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Paket		12	33.400.000	12	33.400.000	12	33.400.000	36	100.200.000	Dinas Tenaga Kerja	
		2	07	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Paket		4	10.000.000	4	10.000.000	2	10.000.000	12	30.000.000	Dinas Tenaga Kerja	
		2	07	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Paket		12	20.000.000	12	20.000.000	12	20.000.000	36	60.000.000	Dinas Tenaga Kerja	
		2	07	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Paket		10	15.000.000	10	15.000.000	10	15.000.000	30	45.000.000	Dinas Tenaga Kerja	
		2	07	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Dokumen		12	13.500.000	12	13.500.000	12	13.500.000	36	40.500.000	Dinas Tenaga Kerja	

TUJUAN	SASARAN	KODE						PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	Baseline (2022)	TARGET KINERJA						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		2	0	0	2.0	0		Penyediaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan		12	90.000.000	12	90.000.000	12	90.000.000	36	270.000.000	Dinas Tenaga Kerja
		2	0	0	2.0			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Laporan		12	313.000.000	12	313.000.000	12	313.000.000	36	939.000.000	Dinas Tenaga Kerja
		2	0	0	2.0	0		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Laporan		12	30.000.000	12	30.000.000	12	30.000.000	36	90.000.000	Dinas Tenaga Kerja
		2	0	0	2.0	0		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Laporan		8	15.000.000	8	15.000.000	8	15.000.000	24	45.000.000	Dinas Tenaga Kerja
		2	0	0	2.0	0		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Laporan		12	268.000.000	12	268.000.000	12	268.000.000	36	804.000.000	Dinas Tenaga Kerja
		2	0	0	09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Dipelihara Unit		12	145.600.000	12	145.600.000	12	145.600.000	36	436.800.000	Dinas Tenaga Kerja
		2	0	0	09	0		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Unit		2	53.100.000	2	53.100.000	2	53.100.000	6	159.300.000	Dinas Tenaga Kerja
		2	0	0	09	0		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Unit		11	12.500.000	11	12.500.000	11	12.500.000	33	37.500.000	Dinas Tenaga Kerja
		2	0	0	09	0		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit		2	70.000.000	1	70.000.000	1	70.000.000	4	210.000.000	Dinas Tenaga Kerja
		2	0	0	09	1		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit		1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	3	30.000.000	Dinas Tenaga Kerja
Meningkatkan perluasan kesempatan kerja	Meningkatnya penempatan tenaga kerja	2	0	0				Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase Dokumen Rencana Tenaga Kerja Persen		100	82.719.970	100	132.719.970	100	82.719.970	100	298.159.910	Dinas Tenaga Kerja
		2	0	0	2.0			Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Yang Disusun Dokumen		2	82.719.970	3	132.719.970	2	82.719.970	7	298.159.910	Dinas Tenaga Kerja
		2	0	0	2.0	0		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro Dokumen		0	0	1	82.719.970	0	0	1	82.719.970	Dinas Tenaga Kerja

TUJUAN	SASARAN	KODE					PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	Baselin e (2022)	TARGET KINERJA						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		2	07	02	2.01	02	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah Perusahaan yang Menyusun RTK Mikro Dokumen		2	82.719.970	2	50.000.000	2	82.719.970	6	215.439.940	Dinas Tenaga Kerja
Meningkatkan perluasan kesempatan kerja	Meningkatnya penempatan tenaga kerja	2	07	03			Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Kompeten Persen		80	380.000.000	80	380.000.000	80	380.000.000	80	1.140.000.000	Dinas Tenaga Kerja
		2	07	03	2.01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase Pencari Kerja yang Mengikuti Pelatihan Berbasis Kompetensi Persen		80	195.000.000	80	195.000.000	80	195.000.000	80	585.000.000	Dinas Tenaga Kerja
		2	07	03	2.01	01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja/Pencari Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi Orang		16	170.000.000	16	170.000.000	16	170.000.000	48	510.000.000	Dinas Tenaga Kerja
		2	07	03	2.01	02	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Lembaga		10	20.000.000	10	20.000.000	10	20.000.000	30	60.000.000	Dinas Tenaga Kerja
		2	07	03	2.01	03	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja Unit		1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	3	15.000.000	Dinas Tenaga Kerja
		2	07	03	2.02		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Terakreditasi Lembaga		7	140.000.000	7	140.000.000	8	140.000.000	22	420.000.000	Dinas Tenaga Kerja
		2	07	03	2.02	01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina Lembaga		8	140.000.000	8	140.000.000	8	140.000.000	24	420.000.000	Dinas Tenaga Kerja
		2	07	03	2.05		Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kerja yang mengikuti Kegiatan Peningkatan dan Pengukuran Produktivitas Orang		16	45.000.000	16	45.000.000	16	45.000.000	48	135.000.000	Dinas Tenaga Kerja
		2	07	03	2.05	01	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah Dokumen		1	45.000.000	1	45.000.000	1	45.000.000	3	135.000.000	Dinas Tenaga Kerja
Meningkatkan perluasan kesempatan kerja	Meningkatnya penempatan tenaga kerja	2	07	04			Program Penempatan Tenaga Kerja	Presentase Pencari Kerja yang Mendapat Fasilitas Penempatan Tenaga Kerja Persen		100	461.472.325	100	461.472.325	100	461.472.325	100	1.384.416.975	Dinas Tenaga Kerja
		2	07	04	2.01		Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Fasilitas Pelayanan Antar Kerja Orang		300	155.752.675	300	155.752.675	300	155.752.675	900	467.258.025	Dinas Tenaga Kerja

TUJUAN	SASARAN	KODE						PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	Baseline (2022)	TARGET KINERJA						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		2	0	0	2.0	0		Pelayanan Antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) dan Antar Kerja Luar Negeri (AKL) Orang		200	74.879.425	200	74.879.425	200	74.879.425	600	224.638.275	Dinas Tenaga Kerja
		2	0	0	2.0	0		Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan Bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan Orang		30	37.873.250	30	37.873.250	30	37.873.250	90	113.619.750	Dinas Tenaga Kerja
		2	0	0	2.0	0		Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenaga Kerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD Orang		2	3.000.000	2	3.000.000	2	3.000.000	6	9.000.000	Dinas Tenaga Kerja
		2	0	0	2.0	0		Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja Orang		6	40.000.000	6	40.000.000	6	40.000.000	18	120.000.000	Dinas Tenaga Kerja
		2	0	0	2.0			Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) yang Mendapatkan Izin, Pengawasan dan Pengendalian LPTKS Lembaga		5	5.000.000	5	5.000.000	5	5.000.000	15	15.000.000	Dinas Tenaga Kerja
		2	0	0	2.0	0		Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Jumlah LPTKS yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian Sesuai dengan Aturan yang Berlaku Lembaga		5	5.000.000	5	5.000.000	5	5.000.000	15	15.000.000	Dinas Tenaga Kerja
		2	0	0	2.0			Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah Penyediaan Lowongan Informasi Pasar Kerja Lowongan		50	189.719.650	50	189.719.650	50	189.719.650	150	569.158.950	Dinas Tenaga Kerja
		2	0	0	2.0	0		Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub) Orang		1000	9.719.650	1000	9.719.650	1.000	9.719.650	3.000	29.158.950	Dinas Tenaga Kerja
		2	0	0	2.0	0		Job Fair /Bursa Kerja	Jumlah pencari kerja yang mendapat pekerjaan melalui jobfair/bursa kerja Orang		700	180.000.000	750	180.000.000	750	180.000.000	2.100	540.000.000	Dinas Tenaga Kerja
		2	0	0	2.0			Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Calon Pekerja Migran (CPMI) dan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya Orang		75	111.000.000	75	111.000.000	75	111.000.000	225	333.000.000	Dinas Tenaga Kerja

TUJUAN	SASARAN	KODE						PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	Baselin e (2022)	TARGET KINERJA						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		2	07	04	2.04	01	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) / Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI / PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya Orang		25	76.000.000	25	76.000.000	25	76.000.000	75	228.000.000	Dinas Tenaga Kerja	
		2	07	04	2.04	02	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran (CPMI)	Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani Orang		2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	6	15.000.000	Dinas Tenaga Kerja	
		2	07	04	2.04	03	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Purna Penempatan	Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) Purna yang Diberdayakan Orang		10	30.000.000	10	30.000.000	10	30.000.000	30	90.000.000	Dinas Tenaga Kerja	
Meningkatkan perluasan kesempatan kerja	Terlindunginya tenaga kerja	2	07	05			Program Hubungan Industrial	Presentase Penyelesaian Perselisihan Kasus Ketengakerjaan Persen		100	134.005.260	100	134.005.260	100	134.005.260	100	402.015.780	Dinas Tenaga Kerja	
		2	07	05	2.01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perusahaan yang menerapkan tata kelola yang baik Perusahaan		10	15.267.550	12	15.267.550	15	15.267.550	37	45.802.650	Dinas Tenaga Kerja	
		2	07	05	2.01	03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Indormasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah dan LKS Bipartit dan Pekerja yang terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan Laporan		1	15.267.550	1	15.267.550	1	15.267.550	3	45.802.650	Dinas Tenaga Kerja	
		2	07	05	2.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kasus ketenagakerjaan secara bipartit Perkara		4	118.737.710	4	118.737.710	6	118.737.710	14	356.213.130	Dinas Tenaga Kerja	
		2	07	05	2.02	01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah Perkara		40	52.077.400	40	52.077.400	40	52.077.400	120	156.232.200	Dinas Tenaga Kerja	

TUJUAN	SASARAN	KODE						PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	Baselin e (2022)	TARGET KINERJA						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		2	07	05	2.02	02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan Perkara		4	17.586.450	4	17.586.450	6	17.586.450	14	52.759.350	Dinas Tenaga Kerja	
		2	07	05	2.02	04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang dibina Lembaga		1	49.073.860	1	49.073.860	1	49.073.860	3	147.221.580	Dinas Tenaga Kerja	
Meningkatkan perluasan kesempatan kerja	Meningkatnya penempatan tenaga kerja	3	32				Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase penempatan transmigran yang terseleksi dan terlatih Persen		100	160.000.000	100	160.000.000	100	160.000.000	100	480.000.000	Dinas Tenaga Kerja	
		3	32	03			Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah calon transmigran yang terseleksi, mendapat pelatihan dan diberangkatkan Kepala Keluarga		5	160.000.000	5	160.000.000	5	160.000.000	15	480.000.000	Dinas Tenaga Kerja	
		2	07	03	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Laporan		1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	3	75.000.000	Dinas Tenaga Kerja	
		2	07	03	2.01	04	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	jumlah calon transmigran yang diberangkatkan dan menerima bantuan Kepala Keluarga		5	100.000.000	5	100.000.000	5	100.000.000	15	300.000.000	Dinas Tenaga Kerja	
		2	07	03	2.01	05	Penyuluhan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan Kepala Keluarga		25	20.000.000	25	20.000.000	25	20.000.000	75	60.000.000	Dinas Tenaga Kerja	
		2	07	03	2.01	06	Pelatihan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran dan/atau Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan Orang		5	15.000.000	5	15.000.000	5	15.000.000	15	45.000.000	Dinas Tenaga Kerja	
Setelah Perubahan																			
Meningkatkan penyerapan dan partisipasi angkatan kerja	Meningkatnya akuntabilitas dan pelayanan publik penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Dinas Tenaga Kerja	2	07	01			Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kepuasan ASN Disnaker terhadap Layanan Kesekretariatan Disnaker Indeks		80	2.213.928.978	81	2.213.928.978	82	2.213.928.978	82	6.641.786.934	Dinas Tenaga Kerja	
		2	07	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun Tepat Waktu Dokumen		21	55.000.000	21	55.000.000	21	55.000.000	63	165.000.000	Dinas Tenaga Kerja	

TUJUAN	SASARAN	KODE						PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	Baseline (2022)	TARGET KINERJA						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		2	07	01	2.01	00001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen		13	25.000.000	13	25.000.000	13	25.000.000	39	75.000.000	Dinas Tenaga Kerja
		2	07	01	2.01	00007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Laporan		8	30.000.000	8	30.000.000	8	30.000.000	24	90.000.000	Dinas Tenaga Kerja
		2	07	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Serapan Anggaran Perangkat Daerah %		88	1.460.428.978	89	1.460.428.978	90	1.460.428.978	90	4.381.286.934	Dinas Tenaga Kerja
		2	07	01	2.02	00001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Orang/bulan		302	1.455.428.978	302	1.455.428.978	302	1.455.428.978	906	4.366.286.934	Dinas Tenaga Kerja
		2	07	01	2.02	00007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD Laporan		61	5.000.000	61	5.000.000	61	5.000.000	183	15.000.000	Dinas Tenaga Kerja
		2	07	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang Menerima Pelayanan Kepegawaian sesuai Prosedur Orang		21	50.000.000	21	50.000.000	21	50.000.000	63	150.000.000	Dinas Tenaga Kerja
		2	07	01	2.05	00009	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasar tugas dan fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan Orang		4	20.000.000	32	20.000.000	32	20.000.000	68	60.000.000	Dinas Tenaga Kerja
		2	07	01	2.05	00010	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan Orang		30	30.000.000	32	30.000.000	32	30.000.000	94	90.000.000	Dinas Tenaga Kerja
		2	07	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Paket		12	189.900.000	12	189.900.000	12	189.900.000	36	569.700.000	Dinas Tenaga Kerja
		2	07	01	2.06	00001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Paket		2	8.000.000	2	8.000.000	2	8.000.000	6	24.000.000	Dinas Tenaga Kerja
		2	07	01	2.06	00002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Paket		12	33.400.000	12	33.400.000	12	33.400.000	36	100.200.000	Dinas Tenaga Kerja
		2	07	01	2.06	00003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Paket		4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	12	30.000.000	Dinas Tenaga Kerja

TUJUAN	SASARAN	KODE						PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	Baselin e (2022)	TARGET KINERJA						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		2	07	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Paket		12	20.000.000	12	20.000.000	12	20.000.000	36	60.000.000	Dinas Tenaga Kerja	
		2	07	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Paket		10	15.000.000	10	15.000.000	10	15.000.000	30	45.000.000	Dinas Tenaga Kerja	
		2	07	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Dokumen		12	13.500.000	12	13.500.000	12	13.500.000	36	40.500.000	Dinas Tenaga Kerja	
		2	07	01	2.06	0009	Penyediaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan		12	90.000.000	12	90.000.000	12	90.000.000	36	270.000.000	Dinas Tenaga Kerja	
		2	07	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Laporan		12	313.000.000	12	313.000.000	12	313.000.000	36	939.000.000	Dinas Tenaga Kerja	
		2	07	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Laporan		12	30.000.000	12	30.000.000	12	30.000.000	36	90.000.000	Dinas Tenaga Kerja	
		2	07	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Laporan		12	15.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000	36	45.000.000	Dinas Tenaga Kerja	
		2	07	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Laporan		12	268.000.000	12	268.000.000	12	268.000.000	36	804.000.000	Dinas Tenaga Kerja	
		2	07	01	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Dipelihara Unit		12	145.600.000	12	145.600.000	12	145.600.000	36	436.800.000	Dinas Tenaga Kerja	
		2	07	01	09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Unit		2	53.100.000	2	53.100.000	2	53.100.000	6	159.300.000	Dinas Tenaga Kerja	
		2	07	01	09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Unit		11	12.500.000	11	12.500.000	11	12.500.000	33	37.500.000	Dinas Tenaga Kerja	
		2	07	01	09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit		2	70.000.000	1	70.000.000	1	70.000.000	4	210.000.000	Dinas Tenaga Kerja	

TUJUAN	SASARAN	KODE					PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	Baselin e (2022)	TARGET KINERJA						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		2	07	01	09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit		1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	3	30.000.000	Dinas Tenaga Kerja
Meningkatkan penyerapan dan partisipasi angkatan kerja	Meningkatnya Akses Ke Peluang Kerja	2	07	02			Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase Dokumen Rencana Tenaga Kerja Persen		100	82.719.970	100	132.719.970	100	82.719.970	100	298.159.910	Dinas Tenaga Kerja
		2	07	02	2.01		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Yang Disusun Dokumen		2	82.719.970	3	132.719.970	2	82.719.970	7	298.159.910	Dinas Tenaga Kerja
		2	07	02	2.01	0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro Dokumen		0	0	1	82.719.970	0	0	1	82.719.970	Dinas Tenaga Kerja
		2	07	02	2.01	0002	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah SDM Perusahaan yang mampu Menyusun RTK Mikro Orang		20	82.719.970	10	50.000.000	20	82.719.970	50	215.439.940	Dinas Tenaga Kerja
Meningkatkan penyerapan dan partisipasi angkatan kerja	Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja	2	07	03			Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Kompeten Persen		80	380.000.000	80	380.000.000	80	380.000.000	80	1.140.000.000	Dinas Tenaga Kerja
		2	07	03	2.01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase Pencari Kerja yang Mengikuti Pelatihan Berbasis Kompetensi Persen		80	195.000.000	80	195.000.000	80	195.000.000	80	585.000.000	Dinas Tenaga Kerja
		2	07	03	2.01	0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n Orang		16	170.000.000	16	170.000.000	16	170.000.000	48	510.000.000	Dinas Tenaga Kerja
		2	07	03	2.01	0002	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n Lembaga		10	20.000.000	10	20.000.000	10	20.000.000	30	60.000.000	Dinas Tenaga Kerja
		2	07	03	2.01	0003	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja Unit		1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	3	15.000.000	Dinas Tenaga Kerja
		2	07	03	2.02		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Terakreditasi Lembaga		7	140.000.000	7	140.000.000	8	140.000.000	22	420.000.000	Dinas Tenaga Kerja
		2	07	03	2.02	0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina Lembaga		8	140.000.000	8	140.000.000	8	140.000.000	24	420.000.000	Dinas Tenaga Kerja

TUJUAN	SASARAN	KODE					PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	Baseline (2022)	TARGET KINERJA						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		2	07	03	2.05		Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kerja yang mengikuti Kegiatan Peningkatan dan Pengukuran Produktivitas Orang		16	45.000.000	16	45.000.000	16	45.000.000	48	135.000.000	Dinas Tenaga Kerja
		2	07	03	2.05	0001	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah Dokumen		1	45.000.000	1	45.000.000	1	45.000.000	3	135.000.000	Dinas Tenaga Kerja
Meningkatkan penyerapan dan partisipasi angkatan kerja	Meningkatnya Akses Ke Peluang Kerja	2	07	04			Program Penempatan Tenaga Kerja	Presentase Pencari Kerja yang Mendapat Fasilitas Penempatan Tenaga Kerja Persen		100	461.472.325	100	461.472.325	100	461.472.325	100	1.384.416.975	Dinas Tenaga Kerja
		2	07	04	2.01		Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Fasilitas Pelayanan Antar Kerja Orang		2.100	155.752.675	2.200	155.752.675	2.300	155.752.675	6.600	467.258.025	Dinas Tenaga Kerja
		2	07	04	2.01	0002	Pelayanan Antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) dan Antar Kerja Luar Negeri (AKL) Orang		2.100	74.879.425	2.200	74.879.425	2.300	74.879.425	6.600	224.638.275	Dinas Tenaga Kerja
		2	07	04	2.01	0003	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan Bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan Orang		30	37.873.250	30	37.873.250	30	37.873.250	90	113.619.750	Dinas Tenaga Kerja
		2	07	04	2.01	0004	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenaga Kerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD Orang		2	3.000.000	2	3.000.000	2	3.000.000	6	9.000.000	Dinas Tenaga Kerja
		2	07	04	2.01	0005	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja Orang		30	40.000.000	30	40.000.000	30	40.000.000	90	120.000.000	Dinas Tenaga Kerja
		2	07	04	2.02		Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) yang Mendapatkan Izin, Pengawasan dan Pengendalian LPTKS Lembaga		5	5.000.000	5	5.000.000	5	5.000.000	15	15.000.000	Dinas Tenaga Kerja
		2	07	04	2.01	0002	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Jumlah LPTKS yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian Sesuai dengan Aturan yang Berlaku Lembaga		5	5.000.000	5	5.000.000	5	5.000.000	15	15.000.000	Dinas Tenaga Kerja
		2	07	04	2.03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah Penyediaan Lowongan Informasi Pasar Kerja Lowongan		50	189.719.650	50	189.719.650	50	189.719.650	150	569.158.950	Dinas Tenaga Kerja
		2	07	04	2.03	0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub) Orang		1000	9.719.650	1000	9.719.650	1.000	9.719.650	3.000	29.158.950	Dinas Tenaga Kerja

TUJUAN	SASARAN	KODE						PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	Baselin e (2022)	TARGET KINERJA						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		2	07	04	2.03	0003	Job Fair /Bursa Kerja	Jumlah pencari kerja yang mendapat pekerjaan melalui jobfair/bursa kerja Orang		750	180.000.000	750	180.000.000	750	180.000.000	2.250	540.000.000	Dinas Tenaga Kerja	
		2	07	04	2.04		Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Calon Pekerja Migran (CPMI) dan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya Orang		55	111.000.000	55	111.000.000	55	111.000.000	165	333.000.000	Dinas Tenaga Kerja	
		2	07	04	2.04	0001	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) / Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI / PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya Orang		35	76.000.000	35	76.000.000	35	76.000.000	105	228.000.000	Dinas Tenaga Kerja	
		2	07	04	2.04	0002	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani Orang		2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	6	15.000.000	Dinas Tenaga Kerja	
		2	07	04	2.04	0003	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan Orang		20	30.000.000	20	30.000.000	20	30.000.000	60	90.000.000	Dinas Tenaga Kerja	
Meningkatkan penyerapan dan partisipasi angkatan kerja	Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja	2	07	05			Program Hubungan Industrial	Presentase Penyelesaian Perselisihan Kasus Ketengakerjaan Persen		100	134.005.260	100	134.005.260	100	134.005.260	100	402.015.780	Dinas Tenaga Kerja	
		2	07	05	2.01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perusahaan yang menerapkan tata kelola yang baik Perusahaan		10	15.267.550	12	15.267.550	15	15.267.550	37	45.802.650	Dinas Tenaga Kerja	
		2	07	05	2.01	0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Indormasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan Laporan		1	15.267.550	1	15.267.550	1	15.267.550	3	45.802.650	Dinas Tenaga Kerja	
		2	07	05	2.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kasus ketenagakerjaan secara bipartit Perkara		4	118.737.710	4	118.737.710	4	118.737.710	12	356.213.130	Dinas Tenaga Kerja	
		2	07	05	2.02	0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah Perkara		40	52.077.400	40	52.077.400	40	52.077.400	120	156.232.200	Dinas Tenaga Kerja	
		2	07	05	2.02	0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan Perkara		4	17.586.450	4	17.586.450	4	17.586.450	12	52.759.350	Dinas Tenaga Kerja	

TUJUAN	SASARAN	KODE					PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	Baselin e (2022)	TARGET KINERJA						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota											
		2	07	05	2.02	0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang dibina Lembaga	1	49.073.860	1	49.073.860	1	49.073.860	3	147.221.580	Dinas Tenaga Kerja	
		2	07	05	2.02	0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja Orang									Dinas Tenaga Kerja	
Meningkatkan penyerapan dan partisipasi angkatan kerja	Meningkatnya Akses Ke Peluang Kerja	3	32				Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase penempatan transmigran yang terseleksi dan terlatih Persen	100	160.000.000	100	160.000.000	100	160.000.000	100	480.000.000	Dinas Tenaga Kerja	
		3	32	03			Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah calon transmigran yang terseleksi, mendapat pelatihan dan diberangkatkan Kepala Keluarga	5	160.000.000	5	160.000.000	5	160.000.000	15	480.000.000	Dinas Tenaga Kerja	
		2	07	03	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Laporan	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	3	75.000.000	Dinas Tenaga Kerja	
		2	07	03	2.01	0004	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	jumlah calon transmigran yang dipindahkan dan ditempatkan Kepala Keluarga	5	100.000.000	5	100.000.000	5	100.000.000	15	300.000.000	Dinas Tenaga Kerja	
		2	07	03	2.01	0005	Penyuluhan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan Kepala Keluarga	25	20.000.000	25	20.000.000	25	20.000.000	75	60.000.000	Dinas Tenaga Kerja	
		2	07	03	2.01	0006	Pelatihan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran dan/atau Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan Orang	5	15.000.000	5	15.000.000	5	15.000.000	15	45.000.000	Dinas Tenaga Kerja	

B. Indikator Kinerja Utama dan Perubahannya

1. Indikator Kinerja Utama Sebelum Perubahan

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN MAGETAN

Tugas	:	Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten yang diberikan kepada kabupaten di bidang ketenagakerjaan, bidang transmigrasi dan tugas pembantuan.
Fungsi	:	<ul style="list-style-type: none">a. Perumusan kebijakan di bidang tenaga kerja dan transmigrasi;b. Pelaksanaan kebijakan di bidang tenaga kerja dan transmigrasi;c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang tenaga kerja dan transmigrasi;d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang tenaga kerja dan transmigrasi; dane. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	FORMULASI	SUMBER DATA
1.	Terciptanya hubungan industrial yang harmonis antara pekerja dan pengusaha	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	$\frac{\sum \text{Kasus yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama (PB)}}{\sum \text{Kasus yang dicatatkan}} \times 100\%$	Bidang Hubungan Industrial, Syarat Kerja, dan Transmigrasi
2.	Meningkatnya jumlah tenaga kerja yang memiliki kompetensi	Besaran tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi	$\frac{\sum \text{Tenaga kerja yang dilatih}}{\sum \text{Pendaftar pelatihan berbasis kompetensi}} \times 100\%$	Bidang Pelatihan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja
3.	Meningkatnya jumlah transmigran yang ditempatkan	Jumlah transmigran yang ditempatkan	Jumlah transmigran yang ditempatkan	Bidang Hubungan Industrial, Syarat Kerja, dan Transmigrasi
4.	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja	Besaran pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	$\frac{\sum \text{Pencari kerja terdaftar yang ditempatkan}}{\sum \text{Pencari kerja yang terdaftar}} \times 100\%$	Bidang Pelatihan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja

KEPALA DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN MAGETAN



GATOT SAPTO PRIYONO, S.Sos, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19630510 199011 1 001

2. Indikator Kinerja Ujama Setelah Perubahan

INDIKATOR KINERJA UTAMA

TAHUN 2024 2026

INSTANSI	: DINAS TENAGA KERJA
VISI	: -
MISI	: -
TUGAS	: Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten yang diberikan kepada kabupaten di bidang ketenagakerjaan, bidang transmigrasi dan tugas pembantuan
FUNGSI	: <ol style="list-style-type: none">1. perumusan kebijakan di bidang tenaga kerja dan transmigrasi;2. pelaksanaan kebijakan di bidang tenaga kerja dan transmigrasi;3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang tenaga kerja dan transmigrasi;4. pelaksanaan administrasi dinas di bidang tenaga kerja dan transmigrasi; dan5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL/FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya Akses Ke Peluang Kerja	Persentase penyerapan tenaga kerja	<p>Pencari kerja adalah angkatan kerja yang sedang menganggur dan mencari pekerjaan baik di dalam atau luar negeri (Perpres No. 36 Tahun 2020)</p> <p>Pencari kerja yang ditempatkan adalah pencari kerja yang diterima bekerja oleh pemberi kerja</p> <p>Pencari kerja terdaftar adalah pencari kerja yang mendaftarkan dan tercatat pada dinas Provinsi/Kabupaten/Kota yang menangani bidang ketenagakerjaan</p> $\frac{\sum \text{pencari kerja yang ditempatkan}}{\sum \text{pencari kerja yang terdaftar}} \times 100$	Bidang Pelatihan Kerja Dan Penempatan Tenaga Kerja	<p>Kepala Dinas Tenaga Kerja</p> <p>Kepala Bidang Pelatihan Kerja Dan Penempatan Tenaga Kerja</p>
2.	Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja	Tingkat produktivitas tenaga kerja	<p>PDRB atas dasar harga konstan</p> <p>menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai dasar</p>	Bidang Pelatihan Kerja Dan Penempatan Tenaga Kerja	Kepala Dinas Tenaga Kerja

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL/FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
			<p>Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.</p> <p>$\frac{\text{PDRB tahun berjalan atas dasar harga konstan}}{\Sigma \text{tenaga kerja}}$</p>	Bidang Hubungan Industrial, Syarat Kerja Dan Transmigrasi	<p>Kepala Bidang Pelatihan Kerja Dan Penempatan Tenaga Kerja</p> <p>Kepala Bidang Hubungan Industrial, Syarat Kerja Dan Transmigrasi</p>

Magetan, 2024

KEPALA DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN MAGETAN


Drs. ARIEF RIDWAN, M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19660516 198603 1 005

C. Matriks Renja Tahun 2024

Tabel 3.3
Rencana Program Dan Kegiatan Perubahan Renja Dinas Tenaga Kerja Tahun 2024

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024								PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024		LOKASI		PAGU INDIKATIF (Rp)				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
			SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	PERUBAHAN PENJABARAN TERAKHIR	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/(BERKURANG)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10-9)	12	13
	DINAS TENAGA KERJA						4.139.895.809,00	4.844.431.809,00	5.458.578.590,00	614.146.781,00		5.140.392.028
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						4.047.395.809,00	4.751.931.809,00	5.386.078.590,00	634.146.781,00		5.064.292.028
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA						4.047.395.809,00	4.751.931.809,00	5.386.078.590,00	634.146.781,00		5.064.292.028
2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kepuasan ASN Dinas Tenaga Kerja terhadap layanan kesekretariatan Dinas Tenaga Kerja	80 Indeks	80 Indeks	Kab. Magetan	Kab. Magetan	3.182.395.809,00	3.398.481.809,00	3.457.628.590,00	59.146.781,00	81 Indeks	3.555.470.028
2.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun Tepat Waktu	21 Dokumen	21 Dokumen	Kab. Magetan	Kab. Magetan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	21 Dokumen	38.102.820
2.07.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13 Dokumen	13 Dokumen	Kab. Magetan	Kab. Magetan	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	13 Dokumen	20.875.000

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024								PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024		LOKASI		PAGU INDIKATIF (Rp)				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
			SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	PERUBAHAN PENJABARAN TERAKHIR	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/(BERKURANG)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10-9)	12	13
2.07.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan	8 Laporan	Kab. Magetan	Kab. Magetan	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	8 Laporan	17.227.820
2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Serapan Anggaran Perangkat Daerah	88 Persen	88 Persen	Kab. Magetan	Kab. Magetan	2.413.895.809,00	2.629.981.809,00	2.669.128.590,00	39.146.781,00	89 Persen	2.910.917.208
2.07.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21 Orang/bulan	302 Orang/bulan	Kab. Magetan	Kab. Magetan	2.409.895.809,00	2.625.981.809,00	2.665.128.590,00	39.146.781,00	23 Orang/bulan	2.909.167.208
2.07.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD											
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	61 Laporan	61 Laporan	Kab. Magetan	Kab. Magetan	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	61 Laporan	1.750.000
2.07.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang Menerima Pelayanan Kepegawaian sesuai Prosedur	21 Orang	21 Orang	Kab. Magetan	Kab. Magetan	40.000.000,00	40.000.000,00	37.800.000,00	-2.200.000,00	32 Orang	39.250.000

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024								PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024		LOKASI		PAGU INDIKATIF (Rp)				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
			SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	PERUBAHAN PENJABARAN TERAKHIR	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/(BER KURANG)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10-9)	12	13
2.07.01.2.05.0009	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasar tugas dan fungsi											
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang	4 Orang	Kab. Magetan	Kab. Magetan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	32 Orang	29.625.000
2.07.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan											
		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	30 Orang	30 Orang	Kab. Magetan	Kab. Magetan	30.000.000,00	30.000.000,00	27.800.000,00	-2.200.000,00	32 Orang	9.625.000
2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Paket	12 Paket	Kab. Magetan	Kab. Magetan	193.000.000,00	193.000.000,00	220.396.750,00	27.396.750,00	12 Paket	170.375.000
2.07.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor											
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	Kab. Magetan	Kab. Magetan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	2 Paket	5.000.000
2.07.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	12 Paket	12 Paket	Kab. Magetan	Kab. Magetan	50.000.000,00	50.000.000,00	55.396.750,00	5.396.750,00	12 Paket	30.875.000

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024								PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024		LOKASI		PAGU INDIKATIF (Rp)				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
			SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	PERUBAHAN PENJABARAN TERAKHIR	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/(BERKURANG)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10-9)	12	13
		Disediakan										
2.07.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga											
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	Kab. Magetan	Kab. Magetan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	2 Paket	12.500.000
2.07.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor											
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	Kab. Magetan	Kab. Magetan	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	12 Paket	20.000.000
2.07.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan											
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	Kab. Magetan	Kab. Magetan	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	6 Paket	15.000.000
2.07.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan											
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	Kab. Magetan	Kab. Magetan	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	12 Dokumen	13.000.000
2.07.01.2.06.0009	Penyediaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024								PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024		LOKASI		PAGU INDIKATIF (Rp)				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
			SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	PERUBAHAN PENJABARAN TERAKHIR	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/(BER KURANG)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10-9)	12	13
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	Kab. Magetan	Kab. Magetan	80.000.000,00	80.000.000,00	102.000.000,00	22.000.000,00	12 Laporan	74.000.000
2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Laporan	12 Laporan	Kab. Magetan	Kab. Magetan	333.000.000,00	333.000.000,00	329.603.250,00	-3.396.750,00	12 Laporan	327.325.000
2.07.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	Kab. Magetan	Kab. Magetan	30.000.000,00	30.000.000,00	34.858.600,00	4.858.600,00	12 Laporan	40.000.000
2.07.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Laporan	8 Laporan	Kab. Magetan	Kab. Magetan	10.000.000,00	10.000.000,00	11.300.000,00	1.300.000,00	8 Laporan	11.000.000
2.07.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	Kab. Magetan	Kab. Magetan	293.000.000,00	293.000.000,00	283.444.650,00	-9.555.350,00	12 Laporan	276.325.000
2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Dipelihara	12 Unit	12 Unit	Kab. Magetan	Kab. Magetan	152.500.000,00	152.500.000,00	150.700.000,00	-1.800.000,00	15 unit	69.500.000

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024								PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024		LOKASI		PAGU INDIKATIF (Rp)				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
			SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	PERUBAHAN PENJABARAN TERAKHIR	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/(BERKURANG)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10-9)	12	13
2.07.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan											
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	2 Unit	Kab. Magetan	Kab. Magetan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.200.000,00	200.000,00	2 Unit	47.000.000
2.07.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	11 Unit	Kab. Magetan	Kab. Magetan	12.500.000,00	12.500.000,00	10.500.000,00	-2.000.000,00	11 Unit	12.500.000
2.07.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya											
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	Kab. Magetan	Kab. Magetan	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0 Unit	0
2.07.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya											
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit			10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	1 Unit	10.000.000

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024								PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024		LOKASI		PAGU INDIKATIF (Rp)				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
			SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	PERUBAHAN PENJABARAN TERAKHIR	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/(BERKURANG)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10-9)	12	13
2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase Dokumen Rencana Tenaga Kerja	100 Persen	100 Persen			70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	100 Persen	133.750.000
2.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen			70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	1 Dokumen	70.000.000
2.07.02.2.01.0003	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro											
		Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro	20 Orang	20 Orang	Kab. Magetan	Kab. Magetan	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	20 Orang	63.750.000
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja yang Kompeten	80 Persen	100 Persen			240.000.000,00	593.800.000,00	1.168.800.000,00	575.000.000,00	85 Persen	597.422.000
2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase Pencari Kerja yang Mengikuti Pelatihan Berbasis Kompetensi	80 Persen	100 Persen			140.000.000,00	493.800.000,00	1.068.800.000,00	575.000.000,00	85 Persen	503.200.000
2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi											
		Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	16 Orang	196 Orang	Kab. Magetan	Kab. Magetan	120.000.000,00	473.800.000,00	1.048.800.000,00	575.000.000,00	90 Orang	483.200.000
2.07.03.2.01.0002	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja											

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024								PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024		LOKASI		PAGU INDIKATIF (Rp)				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
			SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	PERUBAHAN PENJABARAN TERAKHIR	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/(BERKURANG)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10-9)	12	13
		Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	10 Lembaga	10 Lembaga	Kab. Magetan	Kab. Magetan	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	10 Lembaga	15.000.000
2.07.03.2.01.0003	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja											
		Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	1 Unit	1 Unit	Kab. Magetan	Kab. Magetan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	2 Unit	5.000.000
2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Terakreditasi	7 Lembaga	7 Lembaga			70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	7 Lembaga	66.722.000
2.07.03.2.02.0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta											
		Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	8 Lembaga	12 Lembaga	Kab. Magetan	Kab. Magetan	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	20 Lembaga	66.722.000
2.07.03.2.05	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kerja yang mengikuti Kegiatan Peningkatan dan Pengukuran Produktivitas	20 Orang	20 Orang			30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	30 Orang	27.500.000
2.07.03.2.05.0001	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja											

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024								PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024		LOKASI		PAGU INDIKATIF (Rp)				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
			SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	PERUBAHAN PENJABARAN TERAKHIR	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/(BERKURANG)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10-9)	12	13
		Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Magetan	Kab. Magetan	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	1 Dokumen	27.500.000
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Presentase Pencari Kerja yang Mendapat Fasilitas Penempatan Tenaga Kerja	100 Persen	100 Persen			432.500.000,00	432.500.000,00	432.500.000,00	0,00	100 Persen	512.750.000
2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Fasilitas Pelayanan Antar Kerja	300 Orang	2500 Orang			135.000.000,00	135.000.000,00	135.000.000,00	0,00	1500 Orang	228.500.000
2.07.04.2.01.0002	Pelayanan Antar Kerja											
		Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	300 Orang	1000 Orang	Kab. Magetan	Kab. Magetan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	1500 Orang	44.000.000
2.07.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan Bagi Pencari Kerja											
		Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	30 Orang	30 Orang	Kab. Magetan	Kab. Magetan	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	30 Orang	32.000.000
2.07.04.2.01.0004												
		Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD	50 Orang	50 Orang	Kab. Magetan	Kab. Magetan	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2.07.04.2.01.0005	Perluasan Kesempatan Kerja											

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024								PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024		LOKASI		PAGU INDIKATIF (Rp)				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
			SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	PERUBAHAN PENJABARAN TERAKHIR	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/(BERKURANG)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10-9)	12	13
		Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	30 Orang	30 Orang	Kab. Magetan	Kab. Magetan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	65 Orang	152.500.000
2.07.04.2.02	Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) yang Mendapatkan Izin, Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	5 Lembaga	5 Lembaga			7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	5 Lembaga	5.000.000
2.07.04.2.02.0002	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS											
		Jumlah LPTKS yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian Sesuai dengan Aturan yang Berlaku	5 Lembaga	5 Lembaga	Kab. Magetan	Kab. Magetan	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	5 Lembaga	5.000.000
2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah Penyediaan Lowongan Informasi Pasar Kerja	50 Lowongan	500 Lowongan			205.000.000,00	205.000.000,00	205.000.000,00	0,00	50 Lowongan	200.750.000
2.07.04.2.03.0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online											
		Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	800 Orang	800 Orang	Kab. Magetan	Kab. Magetan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	2500 Orang	3.000.000
2.07.04.2.03.0003	Job Fair /Bursa Kerja											

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024								PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024		LOKASI		PAGU INDIKATIF (Rp)				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
			SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	PERUBAHAN PENJABARAN TERAKHIR	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/(BER KURANG)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10-9)	12	13
		Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	750 Orang	750 Orang	Kab. Magetan	Kab. Magetan	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	750 Orang	197.750.000
2.07.04.2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	-	25 Orang	45 orang			85.000.000,00	85.000.000,00	85.000.000,00	0,00	25 Orang	78.500.000
2.07.04.2.04.0001	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) / Pekerja Migran Indonesia (PMI)											
		Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	25 Orang	25 Orang	Kab. Magetan	Kab. Magetan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	25 Orang	45.000.000
2.07.04.2.04.0002												
		Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani	0 Orang	0 Orang	Kab. Magetan	Kab. Magetan	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.07.04.2.04.0003	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Purna Penempatan											
		Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	20 Orang	20 Orang	Kab. Magetan	Kab. Magetan	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	20 Orang	35.500.000
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Presentase Penyelesaian Perselisihan Kasus Ketengakerjaan	100 Persen	100 Persen			122.500.000,00	257.150.000,00	257.150.000,00	0,00	100 Persen	264.900.000

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024								PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024		LOKASI		PAGU INDIKATIF (Rp)				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
			SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	PERUBAHAN PENJABARAN TERAKHIR	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/(BERKURANG)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10-9)	12	13
2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perusahaan yang menerapkan tata kelola yang baik	10 Perusahaan	10 Perusahaan			10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	5 Perusahaan	8.500.000
2.07.05.2.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan											
		Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	1 Laporan	1 Laporan	Kab. Magetan	Kab. Magetan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	1 Laporan	8.500.000
2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kasus ketenagakerjaan secara bipartit	4 Perkara	4 Perkara			112.500.000,00	247.150.000,00	247.150.000,00	0,00	4 Perkara	256.400.000
2.07.05.2.02.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota											
		Jumlah Perselisihan yang Dicegah	40 Perkara	40 Perkara	Kab. Magetan	Kab. Magetan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	40 Perkara	48.000.000
2.07.05.2.02.0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota											

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024								PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024		LOKASI		PAGU INDIKATIF (Rp)				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
			SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	PERUBAHAN PENJABARAN TERAKHIR	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/(BERKURANG)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10-9)	12	13
		Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	4 Perkara	4 Perkara	Kab. Magetan	Kab. Magetan	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	4 Perkara	15.000.000
2.07.05.2.02.0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota											
		Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	1 Lembaga	1 Lembaga	Kab. Magetan	Kab. Magetan	47.500.000,00	47.500.000,00	47.500.000,00	0,00	1 Lembaga	47.500.000
2.07.05.2.02.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja											
		Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	-	1.200 Orang	Kab. Magetan	Kab. Magetan	0,00	134.650.000,00	134.650.000,00	0,00	1370 Orang	151.650.000
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						92.500.000,00	92.500.000,00	72.500.000,00	-20.000.000,00		80.000.000
3.32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI						92.500.000,00	92.500.000,00	72.500.000,00	-20.000.000,00		80.000.000
3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase penempatan transmigran yang terseleksi dan terlatih	100 Persen	100 Persen			92.500.000,00	92.500.000,00	72.500.000,00	-20.000.000,00	100 Persen	80.000.000
3.32.03.2.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah calon transmigran yang terseleksi, mendapat pelatihan dan diberangkatkan	3 KK	1 KK			92.500.000,00	92.500.000,00	72.500.000,00	-20.000.000,00	2 Kepala Keluarga	80.000.000

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024								PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024		LOKASI		PAGU INDIKATIF (Rp)				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
			SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	PERUBAHAN PENJABARAN TERAKHIR	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/(BER KURANG)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10-9)	12	13
3.32.03.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota											
		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan	Kab. Magetan	Kab. Magetan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00		0,00
3.32.03.2.01.0004	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota											
		Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan	3 Kepala Keluarga	1 Kepala Keluarga	Kab. Magetan	Kab. Magetan	67.500.000,00	67.500.000,00	47.500.000,00	-20.000.000,00	2 Kepala Keluarga	80.000.000
3.32.03.2.01.0005	Penyuluhan Transmigrasi											
		Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan	10 Kepala Keluarga	10 Kepala Keluarga	Kab. Magetan	Kab. Magetan	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00		0,00
3.32.03.2.01.0006	Pelatihan Transmigrasi											
		Jumlah Calon Transmigran dan/atau Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan	3 Orang	1 Orang	Kab. Magetan	Kab. Magetan	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00		0,00

D. Perjanjian Kinerja dan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2024



**PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
DINAS TENAGA KERJA**

Jalan Samodra 98 Magetan Kode pos 63318

Telepon/Fax. (0351) 894521

Website : <http://disnaker.magetan.go.id> Email : disnaker@magetan.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Drs. ARIEF RIDWAN, MM**
Jabatan : Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : **Ir. HERGUNADI, MT**
Jabatan : Pj. Bupati Magetan

Selaku atasan langsung pihak pertama.

Selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka memberikan penghargaan dan sanksi.

Magetan, Januari 2024

Pihak Kedua,

Ir. HERGUNADI, MT

Pihak Pertama,

Drs. ARIEF RIDWAN, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19660516 198603 1 005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN MAGETAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Besaran pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	75%
2.	Meningkatnya jumlah tenaga kerja yang memiliki kompetensi	Besaran tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi	85%
3.	Terciptanya hubungan industrial yang harmonis antara pekerja dan pengusaha	Persentase perusahaan yang menerapkan tata Kelola kerja yang layak	3,25%
4.	Meningkatnya jumlah transmigran yang ditempatkan	Persentase transmigran yang ditempatkan	33,33%
5.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Skor IKM	89,22

No.	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 3.182.395.809,-	-
2	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Rp. 70.000.000,-	-
3	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp. 240.000.000,-	-
4	Program Penempatan Tenaga Kerja	Rp. 432.500.000,-	-
5	Program Hubungan Industrial	Rp. 122.500.000,-	-
6	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Rp. 92.500.000,-	-
JUMLAH		Rp. 4.139.895.809,-	

Magetan, Januari 2024



BUPATI MAGETAN
IR. HERGUNADI, MT



**KEPALA DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN MAGETAN**
Drs. ARIEF RIDWAN, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19660516 198603 1 005

2. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN DINAS TENAGA KERJA

Jalan Samodra 98 Magetan Kode pos 63318
Telepon/Fax. (0351) 894521
Website : <http://disnaker.magetan.go.id> Email :
disnaker@magetan.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Drs. ARIEF RIDWAN, MM**
Jabatan : Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : **NIZHAMUL, S.E, M.M**
Jabatan : Pj. Bupati Magetan

Selaku atasan langsung pihak pertama.

Selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka memberikan penghargaan dan sanksi.



Pihak Kedua,

NIZHAMUL, S.E, M.M

Magetan, November 2024



Pihak Pertama,

Drs. ARIEF RIDWAN, MM

Penanda Utama Muda
NIP. 19660516 198603 1 005

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN MAGETAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	5
1.	Meningkatnya Akses Ke Peluang Kerja	Persentase penyerapan tenaga kerja	75 %
2.	Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja	Tingkat produktivitas tenaga kerja	35,35 Juta rp/tenaga kerja
3.	Meningkatnya akuntabilitas dan pelayanan publik penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Dinas Tenaga Kerja	Nilai SAKIP Dinas Tenaga Kerja	90,10
		Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Tenaga Kerja	85,50

	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	3.457.628.590,-	
2	Program Perencanaan Tenaga Kerja	70.000.000,-	
3	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	1.168.800.000,-	
4	Program Penempatan Tenaga Kerja	432.500.000,-	
5	Program Hubungan Industrial	257.150.000,-	
6	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	72.500.000,-	
	TOTAL	5.458.578.590,-	

Magetan, November 2024



HIZHAMUL, S.E, M.M

KEPALA DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN MAGETAN



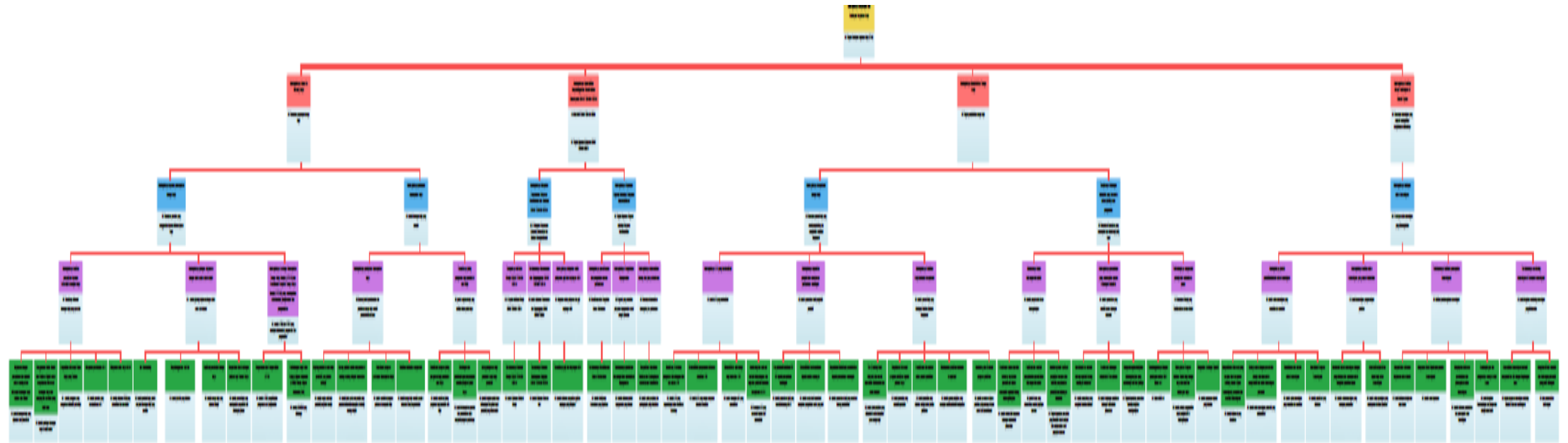
Drs. ARIEF RIDWAN, MM
Pemuda Utama Muda
NIP. 19660516 198603 1 005

E. Pengukuran Kinerja

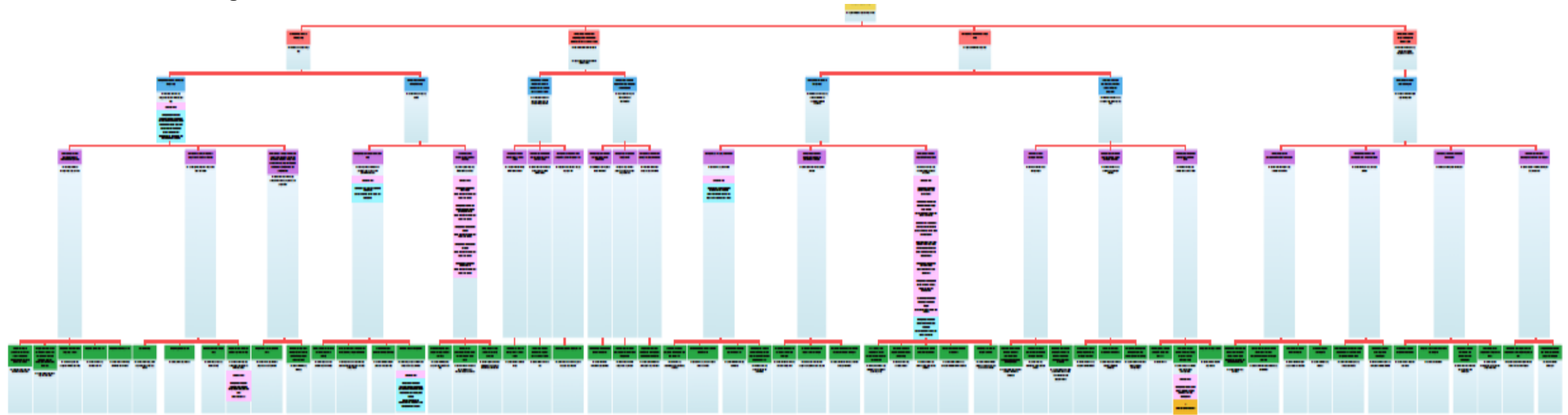
pengukuran Kinerja Dinas Tenaga Kerja
Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori
Meningkatnya Akses Ke Peluang Kerja	Persentase penyerapan tenaga kerja	75 %	76,99%	102,65%	Sangat berhasil
Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja	Tingkat produktivitas tenaga kerja	35,35 Juta rp/tenaga kerja	35,28* Juta rp/tenaga kerja	99,80%	berhasil
Meningkatnya akuntabilitas dan pelayanan publik penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Dinas Tenaga Kerja	Nilai SAKIP Dinas Tenaga Kerja	90,10	90,03	99,92	Berhasil
	Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Tenaga Kerja	85,50	85,55	100,06	Sangat berhasil

F. Pohon Kinerja



G. Crosscutting



H. Cascading

